



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyertaan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/7310/Keuda Tanggal 10 Maret 2023 Perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023;

- e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari Nomor S-34/KP-2901/2023 Perihal Jawaban Atas Surat Permohonan Penjelasan PPh 21 Atas Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
13. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

- keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
  16. Sistem Evaluasi berdasarkan Faktor Jabatan (*Factor Evaluation System*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor - faktor jabatan.
  17. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
  18. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
  19. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
  20. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
  21. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
  22. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
  23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
  24. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
  25. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
  26. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
  27. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  28. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  29. Indeks Prestasi Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan penilaian prestasi kerja.
  30. Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disebut ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.

31. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
32. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
34. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
36. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
37. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
38. Penjabat adalah Pegawai ASN yang diangkat dalam struktur jabatan ASN.
39. Penanggung Jawab Tugas Pokok dan Fungsi yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Tupoksi adalah pejabat fungsional atau pelaksana yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi dalam suatu satuan kerja berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja SKPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Penghasilan Pegawai ASN dan sebagai acuan bagi setiap Penghasilan Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB III  
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

Ketentuan hari kerja dari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:

- a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.30 Wita;
- b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s/d 11.30 Wita; dan
- c. setiap hari diwajibkan Apel Pagi dan Apel Siang, kecuali hari Jum'at kegiatan Senam Pagi dan Apel Siang.

BAB IV  
PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
  - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - d. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan
  - e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintahan Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
  - b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan; dan
  - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
  - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;
  - c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan atau cuti besar untuk keperluan melahirkan anak keempat dan seterusnya dengan disertai

surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; dan

- d. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar atau cuti lainnya untuk keperluan ibadah haji atau umroh, dan untuk keperluan ibadah lainnya, tidak lebih 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) TPP ASN diberikan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

#### Pasal 5

Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

#### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi menerima TPP sebesar atau sama dengan nominal TPP jabatan pengawas (eselon IVa) sebelumnya yang disederhanakan pada SKPD tempat bersangkutan bertugas.
- (3) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi yang mengalami perubahan kelas jabatan maka TPP yang diberikan sesuai kelas jabatan berdasarkan hasil validasi Kementerian PANRB.
- (4) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang tidak ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi menerima TPP ASN sesuai kelas jabatan yang bersangkutan.
- (5) Pelaksana/JFT selain hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi diberikan TPP ASN masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP jabatan yang bersangkutan.
- (6) Pelaksana/JFT selain hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi

sekaligus sebagai PPTK diberikan TPP sebesar nominal TPP pada jabatan Pengawas (eselon IVa) sebelumnya yang disederhanakan pada SKPD tempat bersangkutan bertugas.

- (7) Pejabat fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang mengalami perubahan Kelas Jabatan berdasarkan hasil validasi Menteri PANRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka TPP nya dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan tersebut, dengan persentase kriteria perhitungan sesuai pada jabatan struktural sebelumnya.
- (8) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan TPP ASN, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
  - a. Penjabat Sekretaris Daerah;
  - b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
  - c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
  - d. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;
  - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
  - f. Pejabat Penatausahaan Barang;
  - g. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - h. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD;
  - i. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator selaku pembantu PPK;
  - j. Ajudan atau Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
    - 1) Ajudan Bupati;
    - 2) Ajudan Wakil Bupati;
    - 3) Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
    - 4) Ajudan Sekretaris Daerah.
  - k. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
    - 1) Sopir Bupati;
    - 2) Sopir Wakil Bupati;
    - 3) Sopir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - 4) Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
    - 5) Sopir Sekretaris Daerah.
  - l. Petugas Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - m. Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
  - n. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  - o. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - p. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - q. Pengurus Barang SKPD dan Pengurus Barang PPKD;
  - r. Bendahara Pengeluaran PPKD pada BPKAD;

- s. Bendahara Penerimaan PPKD pada BPKAD dan Bendahara Penerimaan pada Bapenda;
- t. Pembantu Bendahara;
- u. Bendahara Penerimaan SKPD;
- v. Pembantu Pengurus Barang pada SKPD dan Pembantu Pengurus Barang PPKD;
- w. Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah;
- x. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- y. Pembantu Bendahara Penerimaan;
- z. Kuasa Hukum Litigasi;
- aa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- bb. Pejabat Pengadaan; dan
- cc. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak lintas SKPD.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf a diberikan TPP ASN sebesar pagu TPP Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang diterima.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf b dan huruf c hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi selaku PPKD, Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf d, huruf e dan huruf f diberikan TPP ASN masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (6) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf g sampai dengan huruf p diberikan TPP ASN masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Pegawai ASN yang diberi jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf g sampai dengan huruf k diberikan dengan menggunakan pagu TPP tertinggi.

- (8) Ketentuan TPP ASN untuk tim atau pengelola berlaku paling banyak 2 (dua) tim atau pengelola.
- (9) Tim atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Tim atau pengelola sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati ini.
- (10) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf q, huruf r, dan huruf s diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
- (11) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf t diberikan TPP ASN berdasarkan pagu SKPD, dengan ketentuan:
  - a. pagu dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
  - b. pagu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN; atau
  - c. pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 20% (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (12) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf u, huruf w, huruf y dan Pembantu Pengurus Barang pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf v diberikan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan, dengan ketentuan:
  - a. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 7 (tujuh) diberikan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
  - b. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 6 (enam) diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN; dan
  - c. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 5 (lima) ke bawah diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN.
- (13) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Pengurus Barang PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf v diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (14) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf x diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh) persen dari pagu TPP ASN.
- (15) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf z diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) atas setiap gugatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (16) TPP ASN yang diberikan atas Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) didasarkan pada Surat Kuasa dan disertai laporan atas setiap gugatan di setiap bulannya.
- (17) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf aa diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (18) Terhadap Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf bb diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN.



- (19) Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf cc diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
- (20) Terhadap Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pembantu Bendahara dan Verifikator.

#### Pasal 8

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (17) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil aktif berdasarkan Keputusan penetapannya sebagai Penyidik.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala SKPD tembusan kepada Sekretariat Tim TPP.

#### Bagian Kedua Penetapan Besaran TPP ASN

#### Pasal 9

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. IKFD;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

#### Pasal 10

- (1) Besaran *basic* TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IP PD})$$

- (2)  $\text{IKFD} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} = 0,70 \times 0,79 \times 1,00 = 0,551936$ .
- (3) *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:  
 $\text{Besaran Tunjangan BPK} \times 0,551936$ .
- (4) Daftar besaran TPP ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Besaran *basic* TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP ASN dengan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;

- c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan
  - f. pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
  - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP ASN didasarkan prestasi kerja sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau tupoksinya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional;
  - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 20% (dua puluh persen) besaran TPP ASN yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Pemberian TPP ASN didasarkan kondisi kerja sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
  - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
    - 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
    - 3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
    - 4) Pekerjaan berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;
    - 5) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
    - 6) Pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
  - c. selain rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf b, terhadap Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Unit Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan kondisi kerja.
- (5) Pemberian TPP ASN didasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:

- 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
  - 2) kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. diberikan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintahan;
  - c. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN;
  - d. kelangkaan profesi diantaranya adalah:
    - 1) Sekretaris Daerah;
    - 2) Dokter Spesialis;
    - 3) Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
    - 4) Fungsional Pemeriksa (auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD));
    - 5) Penguji Kendaraan Bermotor (PKB);
    - 6) Instruktur pada Balai Latihan Kerja;
    - 7) Penera.
- (6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Bagian Ketiga Penilaian TPP ASN

#### Pasal 12

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:
  - a. Indeks Kedisiplinan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. Indeks Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Indeks penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendapatkan nilai sangat baik diukur dengan jumlah kegiatan dalam aplikasi e-Kita yang ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) kegiatan pada setiap bulan.

### Bagian Keempat Klasifikasi SKPD dan Perhitungan Besaran *Basic* TPP ASN

#### Paragraf 1 Klasifikasi SKPD

#### Pasal 13

- (1) TPP ASN diberikan dengan memperhatikan Klasifikasi SKPD.
- (2) Klasifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelas dan nilai jabatan pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala SKPD.

- (3) Klasifikasi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Klasifikasi I : SKPD yang kelas jabatan 15 (lima belas) dengan nilai jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala SKPD;
  - b. Klasifikasi II : SKPD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala SKPD;
  - c. Klasifikasi III : SKPD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala SKPD; dan
  - d. Klasifikasi IV : SKPD yang kelas jabatan 13 (tiga belas) dengan nilai jabatan 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) dan SKPD yang kelas jabatan 12 (dua belas) dengan nilai jabatan 2.315 (dua ribu tiga ratus lima belas) pada Kepala SKPD.
- (4) Kelurahan dengan kelas jabatan 9 (sembilan) dengan harga jabatan 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) dimasukkan pada kelompok klasifikasi IV.
- (5) Pengklasifikasian SKPD bersifat dinamis.

#### Pasal 14

Klasifikasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. SKPD Klasifikasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a adalah Sekretariat Daerah.
2. SKPD Klasifikasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah:
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. Badan Pendapatan Daerah.
3. SKPD Klasifikasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c adalah:
  - a. Sekretariat DPRD;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Dinas Pariwisata;
  - h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - j. Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - l. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
  - m. Dinas Perhubungan;

- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - q. Dinas Sosial;
  - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - u. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - v. Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Perdagangan; dan
  - w. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
4. SKPD Klasifikasi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d adalah:
- a. BPBD;
  - b. Kecamatan; dan
  - c. Kelurahan.
5. TPP Inspektur lebih tinggi dari Asisten dan lebih rendah dari Sekretaris Daerah.
6. Besaran TPP ASN untuk Pegawai ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetarakan dengan TPP ASN pada SKPD Klasifikasi II.

#### Paragraf 2

#### Perhitungan Besaran *Basic* TPP ASN

#### Pasal 15

Perhitungan Besaran *basic* TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi I :
- a. Pejabat Struktural :
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 15 : 75%.
      - b) Kelas 14 : 70%.
      - c) Kelas 13 : 70%.
      - d) Kelas 12 : 60%.
      - e) Kelas 11 : 60%
      - f) Kelas 9 : 50%.
      - g) Kelas 8 : 50%.
    - 3. Kelangkaan Profesi : 100% (Sekretaris Daerah)
  - b. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyeteraan sebagai Penanggung Jawab Tupoksi:
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 10 : 50%.
      - b) Kelas 9 : 50%.
      - c) Kelas 8 : 50%.

- c. Pejabat Fungsional (JFT PBJ):
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 12 : 50%.
      - b) Kelas 10 : 50%.
      - c) Kelas 8 : 50%.
    - 3. Kelangkaan Profesi :
      - a) Kelas 11 : 40%.
      - b) Kelas 9 : 40%.
      - c) Kelas 8 : 40%.
  - d. Pejabat Fungsional (JFT) lainnya:
    - 1. Beban Kerja : 100 %.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 12 : 15%.
      - b) Kelas 11 : 15%.
      - c) Kelas 10 : 15%.
      - d) Kelas 9 : 15%.
      - e) Kelas 8 : 15%.
      - f) Kelas 7 : 15%.
      - g) Kelas 6 : 15%.
      - h) Kelas 5 : 15%.
  - e. Pelaksana (JFU) :
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 7 : 40% (khusus Bendahara dan Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa).
      - b) Kelas 6 : 40% (khusus Pengelola Unit Layanan Pengadaan dan Ajudan).
      - c) Kelas 5 : -
      - d) Kelas 4 : -
      - e) Kelas 3 : 40%.
      - f) Kelas 2 : -
      - g) Kelas 1 : 40%.
- 2) A. Klasifikasi II : Inspektorat
- a. Pejabat Struktural :
    - 1. Beban Kerja : 100 %.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 14 : 72,5%.
      - b) Kelas 12 : 57,5%.
      - c) Kelas 11 : 57,5%.
      - d) Kelas 9 : 47,5%.
      - e) Kelas 8 : 47,5%.
  - b. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Penanggung Jawab Tupoksi:
    - 1. Beban Kerja : 100 %.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 10 : 47,5%.
      - b) Kelas 9 : 47,5%.

- c) Kelas 8 : 47,5%.
  - c. Pejabat Fungsional Pemeriksa:
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 12 : 40%.
      - b) Kelas 11 : 40%.
      - c) Kelas 10 : 40%.
      - d) Kelas 9 : 40%.
      - e) Kelas 8 : 40%.
      - f) Kelas 7 : 40%.
      - g) Kelas 6 : 40%.
      - h) Kelas 5 : 40%.
    - 3. Kelangkaan Profesi :
      - a) Kelas 12 : 35%.
      - b) Kelas 11 : 35%.
      - c) Kelas 10 : 35%.
      - d) Kelas 9 : 35%.
      - e) Kelas 8 : 35%.
      - f) Kelas 7 : 35%.
      - g) Kelas 6 : 35%.
      - h) Kelas 5 : 35%.
  - d. Pejabat Fungsional (JFT) lainnya:
    - 1. Beban Kerja : 100 %.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 12 : 15%.
      - b) Kelas 11 : 15%.
      - c) Kelas 10 : 15%.
      - d) Kelas 9 : 15%.
      - e) Kelas 8 : 15%.
      - f) Kelas 7 : 15%.
      - g) Kelas 6 : 15%.
      - h) Kelas 5 : 15%.
  - e. Pelaksana (JFU) :
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 7 : 37,5% (khusus Bendahara).
      - b) Kelas 6 : -
      - c) Kelas 5 : -
      - d) Kelas 4 : -
      - e) Kelas 3 : 37,5%.
      - f) Kelas 2 : -
      - g) Kelas 1 : 37,5%.
- B. Klasifikasi II :
- a. Pejabat Struktural :
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 14 : 65%.
      - b) Kelas 12 : 55%.

- c) Kelas 11 : 55%.
  - d) Kelas 9 : 45%.
  - e) Kelas 8 : 45%.
- b. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Penanggung Jawab Tupoksi:
- 1. Beban Kerja : 100 %.
  - 2. Kondisi Kerja :
    - a) Kelas 10 : 45%.
    - b) Kelas 9 : 45%.
    - c) Kelas 8 : 45%.
- c. Pejabat Fungsional (JFT):
- 3. Beban Kerja : 100 %.
  - 4. Kondisi Kerja :
    - a) Kelas 12 : 15%.
    - b) Kelas 11 : 15%.
    - c) Kelas 10 : 15%.
    - d) Kelas 9 : 15%.
    - e) Kelas 8 : 15%.
    - f) Kelas 7 : 15%.
    - g) Kelas 6 : 15%.
    - h) Kelas 5 : 15%.
- d. Pelaksana (JFU) :
- 1. Beban Kerja : 100%.
  - 2. Kondisi Kerja :
    - a) Kelas 7 : 35% (khusus Bendahara).
    - b) Kelas 6 : -
    - c) Kelas 5 : -
    - d) Kelas 4 : -
    - e) Kelas 3 : 35%.
    - f) Kelas 2 : -
    - g) Kelas 1 : 35%.
- 3) Klasifikasi III :
- a. Pejabat Struktural :
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 14 : 55%.
      - b) Kelas 12 : 45%.
      - c) Kelas 11 : 45%.
      - d) Kelas 9 : 35%.
      - e) Kelas 8 : 35%.
  - b. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Penanggung Jawab Tupoksi:
    - 1. Beban Kerja : 100%.
    - 2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 10 : 35%.
      - b) Kelas 9 : 35%.
      - c) Kelas 8 : 35%.



- c. Pejabat Fungsional (JFT) :
1. Beban Kerja : 95%.
  2. Kondisi Kerja :
    - a) Kelas 12 : 10%.
    - b) Kelas 11 : 10%.
    - c) Kelas 10 : 10%.
    - d) Kelas 9 : 10%.
    - e) Kelas 8 : 10%.
    - f) Kelas 7 : 10%.
    - g) Kelas 6 : 10%.
    - h) Kelas 5 : 10%.
  3. Kelangkaan Profesi : 30% (khusus Penguji Kendaraan Bermotor, Instruktur, dan Penera).
- d. Pelaksana (JFU) :
1. Beban Kerja : 95%.
  2. Kondisi Kerja :
    - a) Kelas 7 : 25% (khusus Bendahara).
    - b) Kelas 6 : 25% (khusus Ajudan).
    - c) Kelas 5 : 25% (khusus Pengemudi Mobil VIP dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran).
    - d) Kelas 4 : -
    - e) Kelas 3 : 25%.
    - f) Kelas 2 : -
    - g) Kelas 1 : 25%.
- 4) Klasifikasi IV :
- a. Pejabat Struktural :
    1. Beban Kerja : 100 %.
    2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 13 : 45%.
      - b) Kelas 12 : 45%.
      - c) Kelas 11 : 40%.
      - d) Kelas 9 : 30% (khusus Lurah).
      - e) Kelas 9 : 25%.
      - f) Kelas 8 : 25%.
  - b. Pejabat Fungsional (JFT):
    1. Beban Kerja : 90 %
    2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 11 : -
      - b) Kelas 9 : 5%. (khusus *Rescuer*)
      - c) Kelas 8 : 5%. (khusus *Rescuer*)
      - d) Kelas 7 : 5%. (khusus *Rescuer*)
      - e) Kelas 6 : 5%. (khusus *Rescuer*)
      - f) Kelas 5 : -
    3. Kelangkaan Profesi : -
  - c. Pelaksana (JFU) :
    1. Beban Kerja : 90%.
    2. Kondisi Kerja :
      - a) Kelas 7 : 15% (khusus Bendahara).

- b) Kelas 6 : -
- c) Kelas 5 : 15% (khusus Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran).
- d) Kelas 4 : -
- e) Kelas 3 : 15%.
- f) Kelas 2 : -
- g) Kelas 1 : 15%.

Bagian Kelima  
Penilaian SKP

Pasal 16

- (1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui SKP bulanan.
- (2) Penilaian tingkat kedisiplinan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sesuai ID Pegawai ASN dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*), kecuali Fungsional Penyuluh maka absensi dilakukan secara manual dan bagi yang cacat fisik pada sidik jari maka menggunakan PIN atau Kode.
- (3) Penilaian tingkat kedisiplinan dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*) dikecualikan bagi:
  - a. Sekretaris Daerah; dan
  - b. JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
    - 1) Ajudan dan sopir Pimpinan Daerah;
    - 2) Ajudan dan sopir Pimpinan DPRD; dan
    - 3) Ajudan dan sopir Sekretaris Daerah.
- (4) Apabila terjadi kerusakan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*) maka:
  - a. ID Pegawai ASN dihitung secara manual;
  - b. SKPD membuat laporan tertulis ke Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyelesaikan perbaikan kerusakan pada perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*); dan
  - d. selama perbaikan belum dapat diselesaikan, maka ID dihitung secara manual.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan pada aplikasi lebih dari 14 (empat belas) hari yang menyebabkan tidak dapat melakukan input atas kinerja maka laporan kinerja/SKP bulanan disampaikan secara manual dan nominal TPP ASN yang dibayar *flat* berdasarkan pagu TPP ASN.
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b wajib melakukan inputan atas laporan kinerja/SKP bulanan secara manual.
- (7) SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dicetak (*print*) dan ditandatangani oleh atasan langsung masing-masing untuk dilampirkan pada saat pengamprahan TPP ASN setiap bulannya.

BAB VI  
PEMBAYARAN TPP ASN BAGI CPNS DAN PPPK

Bagian Kesatu  
Pembayaran TPP ASN Bagi CPNS

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah dari jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembayaran TPP Bagi PPPK

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN selama jangka waktu setahun pertama sebagai PPPK.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP memasuki tahun kedua dan seterusnya sebagai PPPK.

BAB VII  
PENYUSUNAN SKP

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai ASN pemangku Jabatan Struktural dan pemangku Jabatan Fungsional wajib menyusun SKP tahunan dan bulanan.
- (2) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penyusunan SKP Tahunan dibuat pada awal bulan Januari dan pengisian realisasi dibuat pada akhir bulan Desember; dan

- b. penyusunan SKP bulanan dibuat pada awal bulan dan pengisian realisasi pada setiap akhir bulan berjalan.

#### Pasal 20

- (1) Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP dan Tingkat Kedisiplinan Pegawai ASN disusun oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh Kepala SKPD sebagai dasar pembayaran TPP ASN.
- (2) Dokumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 21

Pedoman penyusunan SKP Pegawai ASN dan Format SKP tahunan dan bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN

#### Pasal 22

- (1) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi pengukuran terhadap:
  - a. hadir terlambat;
  - b. pulang lebih cepat; dan
  - c. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
  - a. pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sampai dengan hari Kamis diberlakukan:
    - 1) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
    - 2) saat pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA.
  - b. pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
    - 1) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
    - 2) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.
  - c. pengukuran tingkat kedisiplinan bagi SKPD yang memberlakukan sistem kerja *shift* dibuktikan dengan surat tugas;
  - d. apabila terdapat kegiatan kerja lapangan atau kegiatan acara yang tidak memungkinkan untuk melakukan absen sidik jari baik berangkat maupun pulang, maka bukti kehadiran harus dilampiri dengan surat tugas;

- e. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas yang dilengkapi dengan surat tugas, ID Pegawai ASN dalam aplikasi perangkat elektronik kehadiran (*finger print*) tetap dianggap masuk kerja; dan
- f. bagi Penjabat Sementara Kepala Desa yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten atau luar Kabupaten baik dalam provinsi maupun luar provinsi dapat membuat surat tugas menggunakan jabatan utama sebagai Pegawai ASN, maka ID Pegawai ASN dalam aplikasi perangkat elektronik kehadiran (*finger print*) tetap dianggap masuk kerja dan tidak mendapat potongan TPP ASN.

## BAB IX

### PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI, DAN PEJABAT PEMBERI IZIN

#### Pasal 23

Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja dikarenakan oleh kepentingan keluarga, sakit, dan perihal lain yang bisa dipertanggungjawabkan maka kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dapat diberikan izin.

#### Pasal 24

- (1) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk kepentingan diluar kedinasan, diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang telah diambil akan mengurangi hak cuti Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Izin sakit maksimal 3 (tiga) hari disertai dengan surat keterangan dokter tidak mengurangi hak cuti dan TPP ASN.
- (4) Izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari dan tidak menjalani rawat inap disertai dengan surat keterangan dokter untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, maka dilakukan pemotongan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70% (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
- (5) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70% (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
- (6) Izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit.

#### Pasal 25

- (1) Izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.

- (3) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (4) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
- (5) Format surat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

#### Pasal 26

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dapat diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada peraturan tentang THR dan tunjangan ke-13, dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke BPKAD mulai tanggal 15 bulan Desember.
- (5) Rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.
- (6) Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (7) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala SKPD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.

- (10) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan dengan:
- a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
  - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran SKPD memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

## BAB XI PAJAK PENGHASILAN

### Pasal 27

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) atas TPP ASN dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap SKPD harus melakukan input penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) pada sistem Aplikasi *My* TPP baik pada saat awal maupun pada saat terjadi perubahan penghasilan yang disebabkan diantaranya seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan, serta perubahan status perkawinan dan jumlah anggota keluarga.
- (3) Kelalaian atau kekeliruan pada input penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

## BAB XII KEWAJIBAN DAN SANKSI

### Pasal 28

- (1) SKPD memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
  - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
  - b. Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
  - c. Laporan kinerja bulanan;
  - d. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
  - e. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
  - f. Laporan LHKPN dan LHKASN.
  - g. Laporan Kinerja (LKj) tahunan;
  - h. Laporan Reformasi Birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;
  - i. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
  - j. Laporan Dana Alokasi Khusus;

- k. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
  - l. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
  - m. Laporan Barang Milik Daerah; dan
  - n. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja JKN dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja.
- (2) SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
  - (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk pejabat struktural.
  - (4) Sanksi untuk pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap laporan dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pejabat struktural pada SKPD yang dijatuhkan sanksi, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Dikecualikan laporan untuk LHKPN, LHKASN, dan Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dikarenakan bersifat personal pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total TPP ASN yang diterima diberlakukan bagi pejabat Tinggi pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana yang tidak melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan.
  - (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap TPP ASN bulan berikutnya, dan apabila belum juga menyampaikan lebih dari waktu yang ditetapkan maka dikenakan penundaan pembayaran TPP ASN sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.
  - (7) Bagi ASN yang diundang/ditunjuk/ditugaskan mengikuti kegiatan Manunggal Tuntung Pandang berhalangan hadir tanpa keterangan jelas, maka diberikan potongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) absensi dalam setiap kegiatan Manunggal Tuntung Pandang dengan absensi sebanyak 1 (satu) kali.
  - (8) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara resmi dan apel pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
  - (10) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti upacara resmi dan apel pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
  - (11) Bagi Pegawai ASN yang terbukti menggunakan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi akan dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN yang diterima selama satu bulan.



BAB XIII  
MEKANISME PANJATUHAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dibuat berupa rekapitulasi.
- (2) Rekapitulasi laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan ke Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan pada bulan berikutnya.

BAB XIV  
BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dikarenakan wabah/virus, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran (*finger print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditiadakan, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi wabah/virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai ASN dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal masing-masing (WFH) termasuk isolasi mandiri.
- (3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu terhadap:
  - a. Ajudan dan Sopir Bupati;
  - b. Ajudan dan Sopir Wakil Bupati;
  - c. Ajudan dan Sopir Pimpinan DPRD; dan
  - d. Ajudan dan Sopir Sekretaris Daerah.

## BAB XV PENGANGGARAN

### Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka SKPD dapat menganggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XVI EVALUASI

### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, terhitung sejak diundangkan dengan membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

- (1) Dengan adanya perbedaan formulasi yang digunakan dalam perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada DPA SKPD dengan perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada Peraturan Bupati ini, maka besaran pagu TPP ASN per masing-masing Pegawai ASN per kelas jabatan dibayarkan melalui rekening belanja yang telah tercantum dalam dokumen pelaksana anggaran masing-masing SKPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
- (3) Dengan adanya perubahan kriteria pemberian TPP ASN maka aplikasi *My TPP* dilakukan penyesuaian, selama masa penyesuaian aplikasi dimaksud maka pembayaran TPP ASN bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret Tahun 2023 dibayarkan secara *flat* berikut TPP ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (4) Pengajuan SPM atas pembayaran TPP ASN bulan Januari, dan bulan Februari Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari ketentuan Pasal 26 ayat (1).

- (5) SKP untuk bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret Tahun 2023 tetap dilakukan penginputan pada aplikasi e-Kita.
- (6) Dalam penentuan Kelas Jabatan pembayaran TPP ASN berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

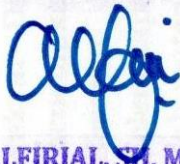
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, ST, MH**  
**NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 33 TAHUN 2023  
TANGGAL : 13 MARET 2023

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayarkan gaji yang adil dan layak kepada Pegawai ASN serta menjamin kesejahteraan Pegawai ASN. Komponen pendapatan yang diterima Pegawai ASN hanya terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan indeks harga yang berlaku di masing-masing daerah.

Segala peraturan dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dampak dari pemberlakuan sistem penggajian dan tunjangan yang semula berbasis pangkat, golongan dan masa kerja menuju merit sistem berbasis pada kelas jabatan dan nilai jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan.

Evaluasi jabatan merupakan bagian dari proses Sumberdaya Manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan gaji dan tunjangan kinerja yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan tersebut.

Secara kualitas sumber daya aparatur, diukur dari kompetensi pegawai dalam melaksanakan sebuah tugas pekerjaan Pemerintah Daerah. Kompetensi pegawai adalah kemampuan pegawai yang meliputi kemampuan pengetahuan atau wawasan, kemampuan keterampilan, dan perilaku yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan. Kuantitas dan kualitas aparatur yang tepat dan memadai akan mendorong pada kinerja pegawai lebih produktif dan terarah mencapai tujuan dan sasaran membangun Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional.

Dengan demikian diperlukan sebuah manajemen sumberdaya aparatur yang dapat mengelola kuantitas dan kualitas pegawai untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah. Manajemen sumberdaya manusia yang komprehensif dengan sistem pengukuran kinerja pegawai yang terukur dan memberikan *feedback* kepada manajemen sumberdaya manusia secara umum.

Manajemen kinerja pegawai menempatkan pegawai sebagai aset Pemerintah Daerah yang perlu dikelola dengan tepat untuk pencapaian kinerja organisasi. Manajemen yang merupakan subsistem dalam manajemen sumberdaya manusia dibangun sebagai landasan dalam pengembangan pegawai maupun pengembangan organisasi secara utuh, serta menjadi dasar dalam pemberian kompensasi berupa tambahan penghasilan bagi pegawai.

## B. NILAI DAN KELAS JABATAN

Evaluasi jabatan merupakan suatu proses manajemen sumberdaya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria – kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Setiap Pemerintah Daerah melakukan evaluasi jabatan untuk menyusun peringkat (kelas) jabatan dilingkungan masing – masing. Pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan). Nilai jabatan dan kelas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelas Jabatan	Batas Nilai	Nilai Rata – Rata Jabatan	Kenaikan Nilai dari Nilai Rata-Rata Jabatan dibawahnya
1	15	3155-4050	3378	425
2	14	2755-3150	2953	400
3	13	2355-2750	2553	325
4	12	2105-2350	2228	250
5	11	1855-2100	1978	250
6	10	1605-1850	1728	250
7	9	1355-1600	1478	250
8	8	1105-1350	1228	250
9	7	855-1100	978	225
10	6	655-850	753	200
11	5	455-650	553	140
12	4	375-450	413	75
13	3	305-370	338	65
14	2	245-300	273	58
15	1	190-240	215	-

### C. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi: bobot 1;
- 2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi: bobot 0,85;
- 3) Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
- 4) Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
- 5) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Tanah Laut adalah 0,836 (nol koma delapan tiga enam) masuk dalam kelompok kapasitas fiskal sedang.

### D. INDEKS KEMAHALAN KONTRUKSI (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan buku Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/ Kota 2021 keluaran BPS RI, dengan nilai IKK sebesar 92,93. Perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Tanah Laut (92,93) dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Jakarta Pusat (117,86) = 0,78848.

## E. INDEKS PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IPPD)

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:

- 1) Opini Laporan Keuangan;
- 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
- 4) Indeks Inovasi Daerah;
- 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Komponen variabel hasil terdiri atas:

- a. Indeks pembangunan manusia; dan
- b. Indeks gini ratio.

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

No	Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi	750	187,5
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Tinggi	800	80
4	Inovasi Daerah	Inovatif (35,00 – 60,00)	400	22,5
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)	1000	180
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 2,01 – 4 %	600	16
7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60 %	400	8
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 70 sd 79	500	45
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio 0,20 sd 0,35	1000	40
	Total			879

## F. BASIC TPP

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah besaran Basic TPP ASN diperoleh menggunakan rumus:

"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiscal daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)"

$$IKFD \times IKK \times IPPD = 0,70 \times 0,79 \times 1,00 = 0,551936$$

Sehingga Basic TPP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar :

$$\text{Besaran Tunjangan BPK} \times 0,551936$$

## G. BESARAN TPP BPK

KELAS	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
16	36.870.000	0,551936	20.349.880
15	29.286.000		16.163.998
14	22.295.000		12.305.413
13	20.010.000		11.044.239
12	16.000.000		8.830.976
11	12.370.000		6.827.448
10	10.760.000		5.938.831
9	9.360.000		5.166.121
8	7.523.000		4.152.215
7	6.633.000		3.660.991
6	5.764.000		3.181.359
5	4.807.000		2.653.156
4	2.849.000		1.572.466
3	2.354.000		1.299.257
2	1.947.000		1.074.619
1	1.540.000		849.981



## H. KLASIFIKASI SKPD

Klasifikasi SKPD digunakan untuk keseimbangan perbandingan TPP ASN dengan memperhatikan indeks kelas jabatan dan nilai jabatan Kepala SKPD.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka untuk menentukan besaran TPP ASN dibagi dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu :

1. Klasifikasi I terdiri dari Sekretariat Daerah.
2. Klasifikasi II terdiri dari SKPD :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. Badan Pendapatan Daerah.
3. Klasifikasi III terdiri dari SKPD :
  - a. Sekretariat DPRD;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Dinas Pariwisata;
  - h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - j. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - l. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - q. Dinas Sosial;
  - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - u. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
  - w. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

#### 4. Klasifikasi IV terdiri dari SKPD :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Kecamatan; dan
- c. Kelurahan.

### I. PENYUSUNAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD, yang masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mempunyai satu atau lebih target kinerja. Target kinerja dituangkan dalam bentuk :

#### 1. Target Kuantitas *Output*

Target Kuantitas *Output* adalah target dari jumlah hasil kerja yang diperoleh dari program/kegiatan/sub kegiatan secara langsung baik berupa barang/dokumen atau frekuensi aktivitas kerja.

Penetapan target kuantitas *output* disesuaikan dengan kontribusi terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah untuk target kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk pejabat struktural lain sampai dengan Fungsional umum/pelaksana secara hierarki mengacu pada target kinerja Kepala Perangkat Daerah. Satuan yang digunakan dalam target kuantitas *output* sangat bergantung pada hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan dan dapat diukur, misalnya dokumen, laporan, naskah, lembar kerja, dan lain-lain.

#### 2. Target Kualitas *Output*

Target Kualitas *Output* adalah target mutu dari hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan dari program/kegiatan/sub kegiatan. Mutu hasil kerja dapat diukur dari kualitas barang/dokumen, tingkat ketepatan waktu/sasaran, atau kualitas proses pekerjaan.

Satuan yang digunakan dalam target kualitas *output* adalah persen (%), besaran persentase target kualitas *output* tergantung pada kualitas hasil kerja atau aktivitas kerja pada target kuantitas *output* yang diharapkan.

#### 3. Target Waktu

Target Waktu adalah target dari waktu penyelesaian sebuah pekerjaan dianggap selesai secara tuntas. Satuan yang digunakan dalam target waktu adalah hari, minggu, bulan dan tahun, misalnya:

- 1 (satu) hari untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang dari 1 (satu) hari;

- 1 (satu) minggu untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang dari 1 (satu) minggu;
- 1 (satu) bulan untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang dari 1 (satu) bulan; dan
- 12 (dua belas) bulan untuk pekerjaan yang rutin dilakukan setiap satu bulan satu kali selama 1 (satu) tahun.

#### 4. Target Biaya

Target Biaya adalah target dari anggaran atau penerimaan yang menjadi beban atau target penerimaan dalam APBD. Satuan yang digunakan dalam target biaya adalah rupiah (Rp) sesuai dengan jumlah anggaran belanja atau target penerimaan yang ada dalam APBD. Target biaya diperuntukkan bagi pejabat struktural serendah-rendahnya eselon IV/Pejabat Pengawas.

#### 5. Pegawai yang menduduki jabatan atau penugasan khusus atau kondisi tertentu, penyusunan target kinerja diatur sebagai berikut:

- a. Pegawai yang diperbantukan pada Instansi lain.

Target kinerja disusun berdasarkan penempatan dalam jabatan pada instansi sesuai ketentuan umum dan persyaratan umum.

- b. Pegawai yang Memiliki Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum untuk kurun waktu sisa masa kerja aktif.

- c. Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu yang Telah Mencapai Pangkat Maksimal

Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum dengan tidak menyusun dan memperhatikan target angka kredit, serta menyesuaikan dengan tugas pokok jabatan fungsional tertentu tersebut.

- d. Pegawai Pindahan dari Instansi Pemerintah Daerah lain

Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum terhitung mulai tanggal ditempatkan.

#### 6. Penyusunan target kinerja disusun sesuai dengan format Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdiri dari lima bagian utama, yaitu:

- a. Bagian data pegawai yang dinilai

Pada bagian data pegawai diuraikan nama, nomor induk pegawai (NIP), pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja pegawai. Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja diisi sesuai surat keputusan pengangkatan atau penempatan dalam jabatan pegawai terakhir.

Pengisian jabatan untuk pelaksana/staf/jabatan fungsional umum tidak hanya dicantumkan pelaksana, namun diikuti dengan jabatan spesifik

lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, atau sesuai dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana/Penempatan Pegawai Dalam Jabatan.

Pengisian unit kerja sesuai dengan unit kerja pada jabatan Atasan Langsung pegawai.

b. Bagian Data Atasan Langsung pegawai yang dinilai

Pada bagian data atasan langsung pegawai yang dinilai, diuraikan nama, nomor induk pegawai (NIP), pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja dari atasan langsung pegawai.

Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja diisi sesuai surat keputusan pengangkatan atau penempatan dalam jabatan atasan langsung pegawai terakhir.

Pengisian unit kerja sesuai dengan unit kerja pada jabatan atasan dari atasan langsung pegawai.

c. Bagian Kegiatan Tugas Jabatan

Pada bagian kegiatan tugas jabatan, diisi sesuai dengan kegiatan yang menjadi tugas pokok jabatan pegawai yang ditulis pada bagian data pegawai yang dinilai, meliputi:

1. Jabatan Struktural

Pada pegawai yang menduduki jabatan struktural, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan dapat diisi tugas pokok yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah atau dengan nama kegiatan yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kepala Perangkat Daerah diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati dan DPA Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- b) Staf ahli Bupati diisi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati.
- c) Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator dan Eselon IV/Pejabat Pengawas/Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati dan DPA masing-masing.

- d) Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas pada Unit Pelayanan Teknis diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati dan DPA masing-masing.
- e) Pelaksana pada Unit Pelayanan Teknis diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati dan DPA masing-masing.

Pengisian kegiatan tugas jabatan bagi:

- a) Pejabat struktural yang tidak mempunyai program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA, maka diisi dengan uraian tugas yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya apabila berturut-turut dalam dua tahun pejabat struktural tidak mempunyai program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan uraian tugas, maka akan dilakukan kajian penataan kelembagaan untuk jabatan tersebut.
- b) Pejabat struktural yang melaksanakan secara penuh program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA karena sesuai dengan tugas jabatannya, tetapi tidak menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka diisi dengan program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA.
- c) Pejabat struktural yang mempunyai program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA tetapi tidak sesuai dengan tugas jabatannya, maka diisi hanya program/kegiatan/subkegiatan yang menjadi tanggungjawabnya saja yang sesuai dengan tugas jabatan. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan/ atau menjadi PPTK/KPA/PA yang tidak sesuai dengan tugas jabatannya maka tidak perlu diisi dalam Kegiatan Tugas Jabatan namun selanjutnya dapat menjadi tugas tambahan.
- d) Pejabat struktural eselon IV/Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah yang kegiatannya bersifat tunggal atau tidak memiliki subkegiatan, maka diisi dengan kegiatan sama dengan pejabat eselon III/Pejabat Administrator sesuai dengan tugas jabatan eselon IV/Pejabat Pengawas.
- e) Pejabat struktural yang menjadi Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt), tidak perlu

mencantumkan program/ kegiatan/ subkegiatan jabatan Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) tersebut dalam kegiatan tugas jabatan, namun cukup diisi hanya program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya saja yang sesuai dengan tugas jabatan. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau menjadi PPTK/KPA/PA yang menjadi tanggung jawab Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) selanjutnya dapat menjadi tugas tambahan.

- f) Pejabat struktural yang diangkat dari pejabat fungsional tertentu dan tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional, maka kegiatan tugas jabatan hanya diisi dengan program/kegiatan/sub kegiatan jabatan struktural, sedangkan tugas jabatan fungsional dapat menjadi tugas tambahan.

## 2. Jabatan Fungsional Umum Yang Melaksanakan Tugas Tertentu

Pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum yang melaksanakan tugas tertentu, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan uraian tugas sesuai dengan jabatan pegawai yang diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

### d. Bagian target kerja

Pada bagian target kerja, diisi target dari hasil kerja atau aktivitas kerja dari setiap kegiatan atau uraian jabatan yang ada pada bagian Kegiatan Tugas Jabatan masing-masing satu atau lebih target kerja.

Target kerja terdiri dari:

#### 1) Target Angka Kredit

Bagian target angka kredit diisi dengan target angka kredit untuk setiap kegiatan unsur utama atau unsur penunjang bagi pejabat fungsional tertentu yang apabila diakumulasikan menjadi target angka kredit untuk satu tahun anggaran.

#### 2) Target Kuantitas *Output*

Bagian target kuantitas *output* diisi dengan jumlah hasil kerja atau aktivitas kerja dari setiap uraian pada bagian Kegiatan Tugas Jabatan bagi seluruh jenis jabatan. Khusus bagi jabatan fungsional tertentu, kuantitas *output* berbanding lurus dengan target angka kredit pada bagian target angka kredit sebelumnya.

#### 3) Target Kualitas *Output*

Bagian target kualitas *output* diisi dengan presentase hasil atau pelaksanaan *output* kerja pada bagian target kuantitas *output* bagi seluruh jenis jabatan.

4) Target Waktu

Bagian target waktu diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja atau pelaksanaan aktivitas kegiatan bagi seluruh jenis jabatan.

5) Target Biaya

Bagian target biaya diisi dengan biaya atau pendapatan yang dianggarkan dalam DPA atau target pendapatan dalam APBD. Target biaya hanya diisi bagi Pengguna Anggaran.

e. Bagian Penetapan Sasaran Kerja Pegawai

Pada bagian penetapan SKP diisi dengan tempat dan tanggal penetapan SKP, dan tandatangan disertai nama dan NIP pegawai yang dinilai dan pejabat penilai yaitu atasan langsung pegawai.

## J. PENJABARAN TARGET KINERJA

Target kinerja yang telah disusun dalam satu tahun, kemudian diuraikan dalam target kinerja bulanan berdasarkan penjabaran pencapaian target kuantitas *output* yang akan dicapai setiap bulan. Lebih lanjut penjabaran pencapaian target kinerja bulanan disusun sebagai berikut:

1. Penjabaran target kinerja disusun dengan menggunakan format Sasaran Kerja Pegawai, memperhatikan target kuantitas *output* SKP tahunan.
2. Apabila target kuantitas *output* dalam bentuk hasil kerja berupa dokumen, naskah atau barang maka target kinerja bulannya disusun dengan membagi hasil kerja tersebut dengan target waktu yang direncanakan.

Contoh :

Seorang pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan Karir, dalam SKP Tahunannya, mencantumkan:

### SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2021 PEGAWAI ASN

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI
1	Nama	1	Nama
2	NIP	2	NIP
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang
4	Jabatan	4	Jabatan
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja

NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mengendalikan kegiatan rapat koordinasi		51 Kali	100	12 Bulan	-
2	Mengendalikan kegiatan Bimtek		48 Keg	100	6 Bulan	-
3	Mengendalikan kegiatan Evaluasi Karir Pegawai ASN		48 Keg	100	7 Bulan	-

Pejabat Penilai,

Tanah Laut, .....  
Pegawai ASN Yang Dinilai.....  
NIP. .........  
NIP. ....

Maka penjabaran target kinerja bulanannya, disusun dalam 1 (satu) bulan yaitu Bulan Januari 2021, sebagai berikut :

**FORMULIR SASARAN KERJA  
PEGAWAI ASN**

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI			
1	Nama	1	Nama			
2	NIP	2	NIP			
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang			
4	Jabatan	4	Jabatan			
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mengendalikan kegiatan rapat koordinasi					
1.a	Melaksanakan rapat koordinasi Awal		5 Kali	100	1 Bulan	
1.b	Melaksanakan rapat pembahasan materi Bimtek		4 Kali	100	1 Bulan	
1.c	Melaksanakan rapat Asistensi		1 Kali	100	1 Bulan	
2	Mengendalikan kegiatan Pembinaan Karir					-
2.a	Melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Kementerian		1 Kali	100	1 Bulan	
2.b	Melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Provinsi		1 Kali	100	1 Bulan	

Pejabat Penilai,

Tanah Laut, .....  
Pegawai ASN Yang Dinilai.....  
NIP. .........  
NIP. ....



3. Apabila target kuantitas *output* dalam bentuk aktivitas kerja bulanan disusun dengan menguraikan sub-sub aktifitas kerja tersebut dengan target waktu yang direncanakan.

Contoh :

Seorang pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan Karir, dalam SKP Tahunannya, mencantumkan:

SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2021  
PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI	
1	Nama			1	Nama		
2	NIP			2	NIP		
3	Pangkat/Gol.Ruang			3	Pangkat/Gol.Ruang		
4	Jabatan			4	Jabatan		
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja		
NO		III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK		TARGET	
						KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU
						WAKTU	BIAYA (Rp)
1	Mengendalikan kegiatan rapat koordinasi			51	Kali	100	12 Bulan
2	Mengendalikan kegiatan Pembinaan Karir Pegawai ASN			48	PD	100	6 Bulan
3	Mengendalikan kegiatan Evaluasi Pengembangan Karir			48	PD	100	7 Bulan

Pejabat Penilai,

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Tanah Laut, .....

Pegawai ASN Yang Dinilai

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

maka penjabaran target kinerja bulannya, disusun sesuai bulan yang direncanakan berikut :

FORMULIR SASARAN KERJA  
PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI	
1	Nama			1	Nama		
2	NIP			2	NIP		
3	Pangkat/Gol.Ruang			3	Pangkat/Gol.Ruang		
4	Jabatan			4	Jabatan		
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja		
NO		III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK		TARGET	
						KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU
						WAKTU	BIAYA (Rp)
1	Mengendalikan kegiatan rapat koordinasi			4	KALI	100%	1 BULAN
2	Mengendalikan kegiatan Pembinaan Karir Pegawai ASN			10	%	100%	1 BULAN

Pejabat Penilai,

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Tanah Laut, .....

Pegawai ASN Yang Dinilai

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

4. Penjabaran target kinerja tahunan disusun sebanyak 1 (satu) SKP, yaitu pada Bulan Januari.
5. Penjabaran target kinerja bulanan disusun sebanyak 12 (dua belas) SKP, yaitu SKP Bulan Januari sampai dengan SKP Bulan Desember.
6. SKP setiap Bulan berisi seluruh kegiatan tugas jabatan, baik yang tercantum di Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maupun dalam DPA.
7. Satuan waktu pada target waktu SKP bulanan adalah hari, minggu atau bulan.
8. Target kinerja pada SKP setiap bulan pada kegiatan Tugas Jabatan Pejabat fungsional tertentu sesuai dengan penyusunan target kinerja SKP Tahunan.

#### K. PENETAPAN TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan capaian hasil kerja atau aktivitas kerja dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pegawai, mengacu pada indikator kinerja atasan langsung secara hierarki dalam kerangka pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Untuk itu penetapan target kinerja pegawai disepakati antara pegawai dengan atasan langsung.

Atasan Langsung adalah pejabat struktural paling rendah eselon IV atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menjadi Pejabat Penilai yang mempunyai hak untuk menyepakati target kinerja dan melakukan penilaian atas pencapaian target kinerja yang menjadi bawahannya.

1. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana/staf maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon IV/Pejabat Pengawas.
2. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon III/Pejabat Administrator yang membidangnya.
3. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada UPT maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon IV/Pejabat Pengawas/Kepala UPT .
4. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a pada UPT, maka pejabat penilai adalah Kepala SKPD.

5. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV.b/Pejabat Pengawas pada UPT, maka pejabat penilai adalah Kepala UPT.
6. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a/Pejabat Pengawas, maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon III.
7. Untuk pegawai yang menduduki jabatan eselon III, maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon II.b pada Organisasi Perangkat Daerah.
8. Untuk pegawai yang menduduki jabatan sebagai Kepala SKPD atasan penilai pada aplikasi e-kita adalah Asisten yang membidangi.
9. Untuk Asisten dan Staf Ahli maka atasan penilai pada aplikasi e-kita adalah Sekretaris Daerah.
10. Apabila dalam kondisi tertentu, jabatan Atasan Langsung belum terisi oleh pejabat definitif, maka Pejabat Penilai adalah atasan dari Atasan Langsung pada Perangkat Daerah tersebut secara hierarki atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atasan dari Atasan Langsung.

Atasan Langsung bertanggungjawab sepenuhnya bersama pegawai yang bersangkutan terhadap penentuan target kinerja dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Target kinerja disusun oleh pegawai mengikuti kegiatan sesuai dengan tugas pokok/fungsi jabatan dan target kinerja Atasan Langsung pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Atasan Langsung menyepakati target kinerja pegawai sesuai dengan pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja pegawai yang ditetapkan dibuat 3 (tiga) rangkap, rangkap pertama untuk dijadikan kendali oleh pegawai yang bersangkutan, rangkap kedua dijadikan kendali oleh Atasan Langsung, rangkap ketiga dijadikan kendali oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

## L. PERUBAHAN TARGET KINERJA

### 1. Perubahan Target Kinerja Tahunan

Target kinerja yang ditetapkan pada prinsipnya berlaku untuk satu tahun, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Target kinerja dapat ditambah, dikurang atau dibuat kembali sesuai dengan

keadaan tertentu. Perubahan target kinerja dilakukan dalam keadaan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan Jabatan

Pegawai yang ditempatkan pada jabatan baru akibat rotasi, promosi, maupun demosi jabatan, maka target kinerja diubah sesuai dengan jabatan baru dengan masa waktu target sisa dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan target kinerja pejabat sebelumnya. Target kinerja jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir tahun.

b. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Tugas pokok dan fungsi jabatan yang mengalami perubahan akibat penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan baru dengan masa waktu target kinerja sisa dalam 1 (satu) tahun. Target kinerja tugas pokok fungsi jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir tahun.

c. Perubahan anggaran

Program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan anggaran akibat pergeseran atau perubahan APBD atau perubahan target pendapatan pada Pajak Daerah/Retribusi Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak dari perubahan anggaran atau perubahan target pendapatan.

d. Pegawai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti hamil, cuti besar, dan cuti sakit.

Berkurangnya masa kerja aktif pegawai akibat pegawai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, cuti, hamil, cuti besar atau cuti sakit, maka target kinerja diubah menyesuaikan dengan sisa masa kerja 1 (satu) tahun dikurangi masa cuti yang dilaksanakan.

e. *Force Majeur*

Dalam hal terjadi bencana alam, perubahan sistem ketatanegaraan atau kondisi *Force majeure* lain yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh *force majeure* baik kuantitas *output*, kualitas *output*, waktu maupun biaya yang ditargetkan sebelumnya.

## 2. Perubahan Target Kinerja Bulanan

Target kinerja yang ditetapkan pada prinsipnya berlaku untuk satu bulan. Target kinerja dapat ditambah, dikurang atau dibuat kembali sesuai dengan keadaan tertentu. Perubahan target kinerja dilakukan dalam keadaan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

### a. Perubahan Jabatan

Pegawai yang ditempatkan pada jabatan baru akibat rotasi, promosi, maupun demosi jabatan, maka target kinerja diubah sesuai dengan jabatan baru dengan masa waktu target sisa dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan target kinerja pejabat sebelumnya. Target kinerja jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir bulan.

### b. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Tugas pokok dan fungsi jabatan yang mengalami perubahan akibat penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan baru dengan masa waktu target kinerja sisa dalam 1 (satu) bulan. Target kinerja tugas pokok fungsi jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir bulan.

### c. Perubahan anggaran

Program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan anggaran akibat pergeseran atau perubahan APBD atau perubahan target pendapatan pada Pajak Daerah/Retribusi Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak dari perubahan anggaran atau perubahan target pendapatan.

### d. Pegawai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti hamil, cuti besar, dan cuti sakit.

Berkurangnya masa kerja aktif pegawai akibat pegawai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, cuti, hamil, cuti besar atau cuti sakit, maka target kinerja diubah menyesuaikan dengan sisa masa kerja 1 (satu) bulan dikurangi masa cuti yang dilaksanakan.

### e. *Force Majeur*

Dalam hal terjadi bencana alam, perubahan sistem ketatanegaraan atau kondisi *Force majeure* lain yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan

Pemerintah Daerah, maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh *force majeure* baik kuantitas *output*, kualitas *output*, waktu maupun biaya yang ditargetkan sebelumnya.

## M. PERILAKU KERJA

Evaluasi kinerja untuk Pegawai Pemerintah Daerah juga diukur dari kemampuan kepribadian berupa perilaku kerja yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai ASN. Pengukuran perilaku kerja pegawai meliputi:

### 1. Orientasi Pelayanan

Orientasi pelayanan merupakan kemampuan Pegawai ASN untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kebutuhan yang dilayani dalam setiap aktivitas kegiatan.

Penilaian orientasi pelayanan diukur dengan :

- a. dapat memenuhi kebutuhan Penerima Layanan;
- b. dapat menindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan Penerima Layanan;
- c. dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang relevan kepada Penerima Layanan;
- d. dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan; dan
- e. dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan.

### 2. Integritas

Integritas merupakan perilaku Pegawai ASN yang mampu bertindak konsisten sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. Penilaian integritas diukur dengan:

- a. tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profesi;
- b. mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh jabatannya;
- c. mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan;
- d. berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan; dan
- e. mampu menjaga kerahasiaan jabatan.

### 3. Komitmen

Komitmen merupakan perilaku Pegawai ASN yang mampu dan memiliki motivasi dalam menyelaraskan perilaku diri untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan

dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.

Penilaian komitmen diukur dengan:

- a. dapat memahami pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya;
- b. dapat ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari besar nasional, perayaan PHBN, HUT Kabupaten, apel kesadaran nasional, dan lain-lain);
- c. dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai; dan
- d. dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

#### 4. Disiplin

Disiplin merupakan perilaku Pegawai ASN yang sanggup melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Penilaian disiplin diukur dengan:

- a. kehadiran apel;
- b. kehadiran pada jam kerja; dan
- c. kerapihan dan kelengkapan atribut pakaian dinas.

#### 5. Kerja Sama

Kerjasama merupakan perilaku Pegawai ASN yang mampu dan memiliki motivasi untuk bekerjasama dengan rekan sekerja, atasan, dan bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya. Penilaian kerjasama diukur dengan:

- a. berperan aktif sebagai anggota Organisasi dalam melakukan tugas/bagiannya untuk mendukung keputusan Organisasi;
- b. dapat membantu rekan kerja/anggota tim yang membutuhkan;
- c. dapat menjaga hubungan kerja yang baik; dan
- d. dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah.

## 6. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan perilaku Pegawai ASN yang mampu dan mau memotivasi serta mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian kepemimpinan diukur dengan:

- a. dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan agenda, mengendalikan waktu, memberi tugas, dan lain-lain);
- b. dapat mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja dengan baik;
- d. dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi; dan
- e. dapat memberikan contoh dengan melakukan perilaku yang diinginkan.

## N. PENILAIAN KINERJA

### 1. Penilaian Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target kerja setiap pegawai dinilai setiap tahun sebagai PPK dan setiap bulan sebagai dasar pemberian TPP ASN yang merupakan bahan evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja selanjutnya menjadi acuan dalam pemberian *reward and punishment*, pelaksanaan sistem promosi dan sistem pendidikan, serta pelatihan pegawai.

Penilaian diukur dari pencapaian unsur-unsur target kinerja sebagai berikut:

- a. Penilaian Target Kinerja Kuantitas *Output*.
- b. Penilaian Target Kinerja Kualitas *Output*.
- c. Penilaian Target Kinerja Waktu.
- d. Penilaian Target Kinerja Biaya.

Nilai capaian target kinerja dinyatakan dalam angka dan sebutan, sebagai berikut:

- a. 91 – ke atas : Sangat Baik;
- b. 76 – 90 : Baik;
- c. 61 – 75 : Cukup;
- d. 51 – 60 : Kurang; dan
- e. 50 – ke bawah : Buruk.

Bobot dari penilaian pencapaian target kinerja secara keseluruhan adalah 70%(tujuh puluh persen) dari penilaian kinerja pegawai.



## 2. Penilaian Perilaku Kerja

Penilaian perilaku kinerja pegawai diukur dari masing-masing aspek perilaku kinerja dalam setiap bulan dan diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun, dengan penilaian sebagai berikut:

### 1) Orientasi pelayanan

Penilaian orientasi pelayanan diukur dengan:

- a. dapat memenuhi kebutuhan Penerima Layanan;
- b. dapat menindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan Penerima Layanan;
- c. dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang relevan kepada Penerima Layanan;
- d. dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan; dan
- e. dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan.

### 2) Integritas

Penilaian integritas diukur dengan:

- tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profesi;
- mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh jabatannya;
- mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan;
- berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan; dan
- mampu menjaga kerahasiaan jabatan.

### 3) Komitmen

Penilaian komitmen diukur dengan:

- dapat memahami pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya;
- dapat ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari besar nasional, perayaan PHBN, HUT Kabupaten, apel kesadaran nasional, dan lain-lain);
- dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai; dan
- dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

### 4) Disiplin

Penilaian disiplin diukur dengan:

- kehadiran apel;

kehadiran pada jam kerja; dan  
kerapihan dan kelengkapan atribut pakaian dinas.

#### 5) Kerja Sama

Penilaian kerjasama diukur dengan:

- berperan aktif sebagai anggota Organisasi dalam melakukan tugas/bagiannya untuk mendukung keputusan Organisasi;
- b. dapat membantu rekan kerja/anggota tim yang membutuhkan;
- c. dapat menjaga hubungan kerja yang baik; dan
- d. dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah.

#### 6) Kepemimpinan

Penilaian kepemimpinan diukur dengan:

- dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan agenda, mengendalikan waktu, memberi tugas, dan lain-lain);
- dapat mengarahkan bawahan menyelesaikan pekerjaan;
- dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja dengan baik;
- dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi; dan
- dapat memberikan contoh dengan melakukan perilaku yang diinginkan.

### 3. Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja adalah penilaian pencapaian target kinerja, tugas tambahan, kreativitas dan perilaku kerja pegawai. Penilaian dilakukan sesuai dengan unsur-unsur penilaian kinerja dengan bobot untuk pencapaian target kerja 70% (tujuh puluh persen) dan perilaku kerja 30% (tiga puluh persen). Penilaian tugas tambahan dan kreativitas merupakan bagian dari penilaian pencapaian target kerja yang diukur setelah penilaian dan pembobotan dari target kinerja kemudian ditambahkan nilai tugas tambahan dan kreativitas sesuai dengan penilaian tersendiri.

Nilai capaian prestasi kerja dinyatakan dalam angka dan sebutan, sebagai berikut:

- a. 91 – ke atas : Sangat Baik;
- b. 76 – 90 : Baik;
- c. 61 – 75 : Cukup;
- d. 51 – 60 : Kurang; dan
- e. 50 – ke bawah : Buruk.

#### 4. Waktu Penilaian

Penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan setiap bulan, dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

- 1) Pegawai menyampaikan realisasi prestasi kerja atas pencapaian target kinerja Pegawai ASN pada sasaran kerja pegawai, kreativitas, dan perilaku kerja setiap akhir bulan berjalan.
- 2) Atasan Langsung melakukan penilaian terhadap usulan realisasi prestasi kerja pegawai setiap akhir bulan berjalan.
- 3) Atasan Langsung menerima atau menolak laporan realisasi prestasi kerja yang disampaikan pegawai, dengan memperhatikan kebenaran laporan dan informasi lain yang relevan.

#### 5. Hasil Penilaian Kinerja

Hasil penilaian prestasi kerja pegawai, merupakan akumulasi penilaian Sasaran Kerja Pegawai, tugas tambahan, kreativitas, dan perilaku kerja dari setiap pegawai setiap bulan oleh atasan langsung, sesuai dengan jabatan dan target kerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hasil penilaian prestasi kerja pegawai digunakan untuk menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada pegawai setiap bulannya. Pencapaian prestasi kerja pegawai dikalikan langsung dengan nilai jabatan dan/atau instrumen lain kemudian dikalikan dengan indeks uang sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

### O. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPP ASN)

#### 1. Pemberian TPP ASN

Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis kinerja adalah Tambahan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan mendasarkan perhitungan penilaian sasaran kerja pegawai dan Tingkat Kedisiplinan Pegawai.

#### 2. Pemberian TPP ASN Mengikuti Ketentuan Sebagai berikut:

##### a) PERHITUNGAN SKP

RENTANG PENILAIAN	NILAI	PAGU TPP	PERHITUNGAN TPP (SKP)
85 – 100	100 %	70%	100 % x 70%

76 – 84	90 %	70%	90 % x 70%
60 – 75	80 %	70%	80% x 70%
51 – 59	70 %	70%	70% x 70%
≤ 50	60 %	70%	60% x 70%

b) PERHITUNGAN TTP INDEK KEDISIPLINAN (ID)

FAKTOR	NILAI ID	PAGU TPP	PERHITUNGAN TPP (ID)
1	2	3	4
Indek Kedisiplinan (ID)	Persentase ID Finger Print Pegawai ASN	30%	K2 x k3

3. Faktor Pengurang

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tambahan penghasilan Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1(satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PROSENTASE PENGURANGAN ( 30% dari Indeks Kedisiplinan )
TL 1	1 menit s.d 30 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d 60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d 90 menit	1,25 %
TL 4	≥ 90 menit	1,5 %

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tambahan penghasilan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PROSENTASE PENGURANGAN ( 30% dari Indeks Kedisiplinan )
PSW 1	1 menit s.d 30 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d 60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d 90 menit	1,25 %

PSW 4	≥ 90 menit	1,5 %
-------	------------	-------

## PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Perhitungan

$$(A + B) - C = \text{TPP ASN}$$

$(\text{TPP ASN (SKP)} + \text{TPP ASN (ID)}) - \text{faktor pengurang} = \text{Jumlah TPP yang diterimakan}$

TPP ASN yang akan diterima oleh pegawai adalah hasil perhitungan TPP SKP ditambah dengan hasil perhitungan TPP ASN ID pada bulan berjalan dikurangi besaran potongan yang dikenakan.

Contoh :

Pegawai atas nama A dengan jabatan Kepala Bidang dengan Pagu TPP ASN sebesar Rp7.000.0000,00 memperoleh nilai PPK sebesar 85 dan dengan ID pernah 1 (satu) kali datang terlambat lebih dari 90 menit dan 1 (satu) kali pulang lebih awal lebih dari 90 menit, maka Perhitungan TPP ASN nya adalah:

### 1. TPP ASN SKP

$$100\% \times 70\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}4.900.000,00$$

### 2. TPP ASN ID

$$97\% \times 30\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}2.037.000,00$$

### 3. PENGURANG

$$(1 \times 1.5\%) = 1,5\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}105.000,00$$

$$(1 \times 1.5\%) = 1,5\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}105.000,00$$

$$= \text{Rp}210.000,00$$

Jumlah TPP ASN yang diterimakan adalah :

$$\text{Rp}4.900.000,00 + \text{Rp}2.037.000,00 - \text{Rp}221.000,00$$

$$(\text{Rp}6.916.000,00 - \text{Rp}221.000,00) = \text{Rp}6.716.000,00$$

## P. PENUTUP

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberikan untuk memacu setiap Pegawai ASN dalam merealisasikan target kinerja. Sementara itu peningkatan daya guna dan hasil guna penilaian prestasi kerja perlu dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi, dalam arti Pegawai ASN yang dinilai terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja yang akan dicapai dan proses penilaian.

Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier Pegawai ASN yang bersangkutan, serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN merupakan acuan bagi Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja dan manajemen sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Q. FORMAT FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUNAN

NO		I. PEJABAT PENILAI	NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI			
1		Nama	1		Nama			
2		NIP	2		NIP			
3		Pangkat/Gol.Ruang	3		Pangkat/Gol.Ruang			
4		Jabatan	4		Jabatan			
5		Unit Kerja	5		Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
1								
2								
3								

Pejabat Penilai,

Tanah Laut, .....

Pegawai ASN Yang Dinilai

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

R. FORMAT FORMULIR SASARAN KERJA BULANAN PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI	NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI			
1		Nama	1		Nama			
2		NIP	2		NIP			
3		Pangkat/Gol.Ruang	3		Pangkat/Gol.Ruang			
4		Jabatan	4		Jabatan			
5		Unit Kerja	5		Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET					
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA		
1								
1.a								
1.b								
1.c								
2								
2.a								
2.b								

Pejabat Penilai,

Tanah Laut, .....

Pegawai ASN Yang Dinilai

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

S. FORMAT FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI	
1	Nama			1	Nama		
2	NIP			2	NIP		
3	Pangkat/Gol.Ruang			3	Pangkat/Gol.Ruang		
4	Jabatan			4	Jabatan		
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/ MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)	
1							
2							
3							

Pejabat Penilai,  
 \_\_\_\_\_  
 NIP. ....

Tanah Laut, .....  
 Pegawai ASN Yang Dinilai  
 \_\_\_\_\_  
 NIP. ....

T. FORMAT PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA BULANAN PEGAWAI ASN

NO		I. PEJABAT PENILAI		NO		II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI	
1	Nama			1	Nama		
2	NIP			2	NIP		
3	Pangkat/Gol.Ruang			3	Pangkat/Gol.Ruang		
4	Jabatan			4	Jabatan		
5	Unit Kerja			5	Unit Kerja		
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)	

1

2

Pejabat Penilai,  
 \_\_\_\_\_  
 NIP. ....

Tanah Laut, .....  
 Pegawai ASN Yang Dinilai  
 \_\_\_\_\_  
 NIP. ....



U. FORMAT FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI ASN

Jangka Waktu Penilaian 02 s.d. 31 Januari 2021

NO	Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PERHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
1a													
1b													
1c													
2													
2a													
2b													
Nilai Capaian SKP													

Tanah Laut, .....  
Pejabat Penilai,

.....  
NIP. ....

V. FORMAT SURAT IZIN

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor :

Dasar : a. .... (1)  
b. ....

Memberikan izin kepada :

Nama :  
Alamat :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja : (2)  
Untuk : (3)  
Terhitung : (4)

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Laut, .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

Keterangan :

- (1) Diisi dengan hal yang menjadi dasar atau pertimbangan izin.
- (2) Diisi unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (3) Diisi sesuai peruntukan izin.
- (4) Diisi lamanya waktu/terhitung tanggal izin yang dimohon.

Contoh Surat Permintaan Izin

Tanah Laut, .....  
Kepada :  
Yth. ....  
( Atasan Langsung )  
Di -  
Tanah Laut

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permintaan izin :

Tidak masuk kerja selama ..... hari terhitung mulai tanggal ..... s.d.  
tanggal.....dikarenakan .....

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

( ..... )  
NIP. ....



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 33 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 13 MARET 2023

A. KLASIFIKASI I

PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
 (KLASIFIKASI I)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	Rp 16.163.998	100%	75%	100%	Rp 44.450.994
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	14	Rp 12.305.413	100%	70%		Rp 20.919.202
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	14	Rp 12.305.413	100%	70%		Rp 20.919.202
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	14	Rp 12.305.413	100%	70%		Rp 20.919.202
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	Rp 11.044.239	100%	70%		Rp 18.775.207
6	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	Rp 11.044.239	100%	70%		Rp 18.775.207
7	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	13	Rp 11.044.239	100%	70%		Rp 18.775.207
8	Kepala Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
9	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
11	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
12	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
13	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
14	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
15	Kepala Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
16	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	Rp 8.830.976	100%	60%		Rp 14.129.562
17	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
19	Kepala Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	Sub Bagian Aset dan Perlengkapan	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
20	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
21	Kepala Sub Bagian Protokol	Kepala Sub Bagian Protokol	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
22	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Pemerintahan	10	Rp 5.938.831	100%	50%		Rp 8.908.247

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Bagian Hukum	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
24	Penyuluh Hukum Muda	Bagian Hukum	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
25	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10	Rp 5.938.831	100%	50%		Rp 8.908.247
26	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	10	Rp 5.938.831	100%	50%		Rp 8.908.247
27	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	10	Rp 5.938.831	100%	50%		Rp 8.908.247
28	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
29	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Organisasi	10	Rp 5.938.831	100%	50%		Rp 8.908.247
30	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	10	Rp 5.938.831	100%	50%		Rp 8.908.247
31	Perencana Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	10	Rp 5.938.831	100%	50%		Rp 8.908.247
32	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	50%		Rp 7.749.181
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
33	Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	10	Rp 5.938.831	100%	15%		Rp 6.829.656
34	Analisis Kebijakan Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
35	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Sekretariat Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
36	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
37	Penyuluh Hukum Muda	Sekretariat Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
38	Penyuluh Hukum Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
39	Perencana Muda	Sekretariat Daerah	10	Rp 5.938.831	100%	15%		Rp 6.829.656
40	Perencana Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
41	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Sekretariat Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
42	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
43	Pranata Komputer Muda	Sekretariat Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
44	Pranata Komputer Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
45	Pranata Komputer Penyelia	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
46	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Sekretariat Daerah	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
47	Pranata Komputer Pelaksana	Sekretariat Daerah	6	Rp 3.181.359	100%	15%		Rp 3.658.563
48	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Sekretariat Daerah	5	Rp 2.653.156	100%	15%		Rp 3.051.130
49	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Sekretariat Daerah	12	Rp 8.830.976	100%	50%	40%	Rp 16.778.854
50	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Sekretariat Daerah	10	Rp 5.938.831	100%	50%	40%	Rp 11.283.780
51	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	50%	40%	Rp 7.889.208
52	Penata Laksana Barang Penyelia	Sekretariat Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
53	Penata Laksana Barang Mahir	Sekretariat Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
54	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat Daerah	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
55	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
56	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	Bagian Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
57	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
58	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
59	Pengelola Kerjasama dan Investasi	Bagian Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
60	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
61	Pengadministrasian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
62	Pengadministrasian Program dan Kerjasama	Bagian Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
63	Pengadministrasian Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
64	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
65	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	Bagian Hukum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
66	Analisis Hukum	Bagian Hukum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
67	Analisis Peraturan Administrasi	Bagian Hukum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
68	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
69	Pengelola Bantuan Hukum	Bagian Hukum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
70	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	Bagian Hukum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
71	Pengadministrasian Hukum	Bagian Hukum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
72	Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
73	Analisis Sosial Budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
74	Analisis Kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
75	Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
76	Pengelola Bantuan Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
77	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
78	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
79	Pengolah Data	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
80	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
81	Pengelola Bimbingan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
82	Pengadministrasian Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
83	Analisis Investasi Daerah	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Penelaah Perkembangan BUMD	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
85	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
86	Analisis Pembangunan	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
87	Analisis Ketahanan Ekonomi	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
88	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
89	Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
90	Pengolah Data	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
91	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
92	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
93	Pengadministrasi Umum	Bagian Perekonomian Pembangunan, Administrasi Pembangunan dan SDA	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
94	Analisis Fasilitas Peningkatan Kompetensi	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
95	Analisis Sistem Informasi	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
96	Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
97	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
98	Pranata Kearsipan	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
99	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Pengadministrasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
101	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
102	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	7	Rp 3.660.991	100%	40%		Rp 5.125.388
103	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	6	Rp 3.181.359	100%	40%		Rp 4.453.903
104	Pengadministrasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
105	Analisis Jabatan	Bagian Umum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
106	Pengelola Teknologi Informasi	Bagian Umum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
107	Pranata Kearsipan	Bagian Umum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
108	Pengadministrasi Umum	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
109	Pengadministrasi Persuratan	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
110	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
111	Pramu Bakti	Bagian Umum	1	Rp 849.981	100%	40%		Rp 1.189.974
112	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Bagian Umum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
113	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Bagian Umum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
114	Pengelola Bangunan Gedung	Bagian Umum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
115	Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang	Bagian Umum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
116	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bagian Umum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
117	Penata Kendaraan Dinas	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
118	Teknisi Sarana dan Prasarana	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
119	Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
120	Teknisi Listrik dan Jaringan	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
121	Teknisi Peralatan Kantor	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
122	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
124	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Bagian Umum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
125	Penata Kendaraan Dinas	Bagian Umum	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
126	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bagian Umum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
127	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Bagian Umum	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
128	Ajudan	Bagian Umum	6	Rp 3.181.359	100%	40%		Rp 4.453.903
129	Teknisi Peralatan Kantor	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
130	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
131	Pengadministrasi Umum	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
132	Pengadministrasi Persuratan	Bagian Umum	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
133	Pengemudi	Bagian Umum	3	Rp 1.299.257	100%	40%		Rp 1.818.960
134	Pramu Kebersihan	Bagian Umum	1	Rp 849.981	100%	40%		Rp 1.189.974
135	Analisis Humas	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
136	Analisis Berita	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
137	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
138	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
139	Operator Komputer Grafis	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
140	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
141	Penata Liputan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
142	Teknisi Produksi Multimedia dan Web	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
143	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
144	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
145	Analisis Protokol	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
146	Pranata Acara	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
147	Petugas Protokol	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
148	Pengemudi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	Rp 1.299.257	100%	40%		Rp 1.818.960

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
150	Analisis Kompetensi	Bagian Organisasi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
151	Analisis Kelembagaan	Bagian Organisasi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
152	Analisis Tata Laksana	Bagian Organisasi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
153	Analisis Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
154	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Bagian Organisasi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
155	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Bagian Organisasi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
156	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Bagian Organisasi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
157	Pengolah Data Kelembagaan	Bagian Organisasi	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
158	Pengelola Tata Naskah	Bagian Organisasi	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
159	Pengolah Data	Bagian Organisasi	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
160	Pengadministrasi Umum	Bagian Organisasi	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
161	Bendahara	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	100%	40%		Rp 5.125.388
162	Analisis Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
163	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
164	Analisis Data dan Informasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
165	Verifikator Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
166	Pengelola Bahan Perencanaan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
167	Pengolah Data Laporan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
168	Pengelola Program dan Laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
169	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
170	Pengadministrasi Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
171	Pengadministrasi Penerimaan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
172	Pengadministrasi Umum	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156

**B. KLASIFIKASI II**

**1. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Inspektur	Inspektorat	14	Rp 12.305.413	100%	72,5%		Rp 21.226.838
2	Sekretaris	Inspektorat	12	Rp 8.830.976	100%	57,5%		Rp 13.908.787
3	Inspektur Pembantu I	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
4	Inspektur Pembantu II	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
5	Inspektur Pembantu III	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
6	Inspektur Pembantu IV	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
7	Inspektur Pembantu V	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	47,5%		Rp 7.620.028
9	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 5.166.121	100%	47,5%		Rp 7.620.028
10	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	Sub Bagian Administrasi dan Umum	9	Rp 5.166.121	100%	47,5%		Rp 7.620.028
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
11	Auditor Madya	Inspektorat	12	Rp 8.830.976	100%	40%	35%	Rp 15.454.208
12	Auditor Muda	Inspektorat	10	Rp 5.938.831	100%	40%	35%	Rp 10.392.955
13	Auditor Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	40%	35%	Rp 7.266.375
14	Auditor Penyelia	Inspektorat	9	Rp 5.166.121	100%	40%	35%	Rp 9.040.712
15	Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	Rp 3.660.991	100%	40%	35%	Rp 6.406.735
16	Auditor Pelaksana	Inspektorat	6	Rp 3.181.359	100%	40%	35%	Rp 5.567.378
17	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	40%	35%	Rp 11.948.035
18	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	Inspektorat	9	Rp 5.166.121	100%	40%	35%	Rp 9.040.712
19	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	40%	35%	Rp 7.266.375
20	Pranata Komputer Muda	Inspektorat	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.166.121
21	Pranata Komputer Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
22	Pranata Komputer Penyelia	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
23	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
24	Pranata Komputer Pelaksana	Inspektorat	6	Rp 3.181.359	100%	15%		Rp 3.658.563
25	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Inspektorat	5	Rp 2.653.156	100%	15%		Rp 3.051.130
26	Penata Laksana Barang Penyelia	Inspektorat	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
27	Penata Laksana Barang Mahir	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
28	Penata Laksana Barang Terampil	Inspektorat	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
29	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
30	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
31	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
33	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
34	Analisis Data dan Informasi	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
35	Pengelola Data Rekonsiliasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
36	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
37	Pengelola Data Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
38	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
39	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%	37,5%		Rp 5.033.863
40	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
41	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
42	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
43	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
44	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
45	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
46	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
47	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	100%	37,5%		Rp 1.786.479

**2. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	Rp 12.305.413	100%	65%		Rp 20.303.932
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	55%		Rp 13.688.013
3	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
4	Kepala Bidang Akuntansi	Bidang Akuntansi	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
5	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Bidang Penatausahaan Aset	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
6	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
10	Kepala Sub Bidang Anggaran	Sub Bidang Anggaran	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
11	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan	Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
12	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban	Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
13	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas	Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
14	Kepala Sub Bidang Inventarisasi	Sub Bidang Inventarisasi	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
15	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
16	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan	Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
17	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
18	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Belanja dan Pembiayaan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Akuntansi	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
20	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
21	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
22	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
23	Pranata Komputer Muda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
24	Pranata Komputer Pertama	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
25	Pranata Komputer Penyelia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
26	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
27	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	Rp 3.181.359	100%	15%		Rp 3.658.563
28	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	Rp 2.653.156	100%	15%		Rp 3.051.130
29	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
30	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
31	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
32	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
33	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
34	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
35	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%	35%		Rp 4.942.339
36	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
38	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
39	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
40	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
41	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
42	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
43	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
44	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	100%	35%		Rp 1.753.997
45	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
46	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Bidang Belanja dan Pembiayaan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
47	Pengadministrasi Anggaran	Bidang Belanja dan Pembiayaan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
48	Analisis Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
49	Analisis Pembiayaan Daerah	Bidang Belanja dan Pembiayaan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
50	Pengelola Pembiayaan Daerah	Bidang Belanja dan Pembiayaan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
51	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
52	Pengolah Data Perbendaharaan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
53	Pengadministrasi Keuangan	Bidang Belanja dan Pembiayaan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
54	Penata Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
55	Pengelola Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Pengadministrasi Keuangan	Bidang Akuntansi	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
57	Penata Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
58	Pengelola Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
59	Pengolah Data Laporan Kas	Bidang Akuntansi	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
60	Pengadministrasi Keuangan	Bidang Akuntansi	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
61	Analisis Aset Daerah	Bidang Penatausahaan Aset	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
62	Analisis Data dan Informasi	Bidang Penatausahaan Aset	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
63	Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang	Bidang Penatausahaan Aset	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
64	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Penatausahaan Aset	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
65	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Bidang Penatausahaan Aset	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
66	Analisis Standard Harga	Bidang Penatausahaan Aset	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
67	Pengelola Barang Persediaan	Bidang Penatausahaan Aset	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
68	Pengadministrasi Umum	Bidang Penatausahaan Aset	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
69	Analisis Aset Daerah	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
70	Pengelola Data	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
71	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
72	Analisis Aset Daerah	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
73	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
75	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156

**3. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	Rp 12.305.413	100%	65%		Rp 20.303.932
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	55%		Rp 13.688.013
3	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
4	Kepala Bidang Sosial Budaya	Bidang Sosial Budaya	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
6	Kepala Bidang Perencanaan Makro	Bidang Perencanaan Makro	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
7	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
11	Perencana Muda	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	10	Rp 5.938.831	100%	45%		Rp 8.611.305
12	Perencana Muda	Bidang Sosial Budaya	10	Rp 5.938.831	100%	45%		Rp 8.611.305
13	Perencana Muda	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	10	Rp 5.938.831	100%	45%		Rp 8.611.305
14	Perencana Muda	Bidang Perencanaan Makro	10	Rp 5.938.831	100%	45%		Rp 8.611.305
15	Peneliti Muda	Bidang Penelitian dan Pengembangan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
16	Peneliti Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
17	Peneliti Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
18	Perencana Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	Rp 5.938.831	100%	15%		Rp 6.829.656

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Perencana Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
20	Pranata Komputer Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
21	Pranata Komputer Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
22	Pranata Komputer Penyelia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
23	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
24	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	Rp 3.181.359	100%	15%		Rp 3.658.563
25	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Rp 2.653.156	100%	15%		Rp 3.051.130
26	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
27	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
28	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
29	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
30	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
31	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
32	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%	35%		Rp 4.942.339
33	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
34	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
35	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
36	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
37	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
39	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
40	Analisis Program Pembangunan Pertanian	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
41	Analisis Kawasan Industri	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
42	Analisis Data Ekonomi Makro	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
43	Penelaah Pengembangan Usaha	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
44	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
45	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
46	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
47	Pengadministrasi Umum	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
48	Analisis Sosial Budaya	Bidang Sosial Budaya	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
49	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Sosial Budaya	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
50	Analisis Politik Dalam Negeri	Bidang Sosial Budaya	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
51	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Bidang Sosial Budaya	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
52	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	Bidang Sosial Budaya	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
53	Pengadministrasi Pemerintahan	Bidang Sosial Budaya	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
54	Pengadministrasi Umum	Bidang Sosial Budaya	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
55	Analisis Infrastruktur	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
56	Analisis Tata Ruang	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
58	Analisis Pengembangan Wilayah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
59	Pengolah Data	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
60	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
61	Pengadministrasi Umum	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
62	Analisis Perencanaan	Bidang Perencanaan Makro	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
63	Analisis Pembangunan	Bidang Perencanaan Makro	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
64	Analisis Perencanaan Anggaran	Bidang Perencanaan Makro	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
65	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Bidang Perencanaan Makro	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
66	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Bidang Perencanaan Makro	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
67	Pengelola Bahan Perencanaan	Bidang Perencanaan Makro	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
68	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Bidang Perencanaan Makro	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
69	Pengadministrasi Umum	Bidang Perencanaan Makro	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
70	Analisis Data di Bidang Evaluasi dan Kerjasama Penelitian	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
71	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
72	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
73	Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
74	Pengadministrasi Umum	Bidang Penelitian dan Pengembangan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156

4. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	14	Rp 12.305.413	100%	65%		Rp 20.303.932
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	55%		Rp 13.688.013
3	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
4	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
5	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
8	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah	Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
9	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
10	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
11	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah	Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
12	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan	Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
13	Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah	Sub Bidang Retribusi Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
17	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Badan Pendapatan Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
18	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	Badan Pendapatan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
19	Pranata Komputer Muda	Badan Pendapatan Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Pranata Komputer Pertama	Badan Pendapatan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
21	Pranata Komputer Penyelia	Badan Pendapatan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
22	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Pendapatan Daerah	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
23	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Pendapatan Daerah	6	Rp 3.181.359	100%	15%		Rp 3.658.563
24	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Pendapatan Daerah	5	Rp 2.653.156	100%	15%		Rp 3.051.130
25	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Pendapatan Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
26	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Pendapatan Daerah	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
27	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Pendapatan Daerah	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
28	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%	35%		Rp 4.942.339
29	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
30	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
31	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
32	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
33	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
34	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
35	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
36	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
37	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
38	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
39	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
40	Pengadministrasi Umum	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
41	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
42	Pengelola Data Transaksi	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Pengadministrasi Umum	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
44	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
45	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
46	Pengadministrasi Umum	Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
47	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
48	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
49	Pengadministrasi Umum	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
50	Analisis Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
51	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
52	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
53	Analisis Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
54	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
55	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
56	Analisis Pajak	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
57	Pengolah Data	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
58	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
59	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
60	Pengelola Laporan Data Penerimaan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
61	Pengelola Pendapatan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Pengadministrasi Penerimaan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
63	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
64	Pengelola Data Transaksi	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
65	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
66	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
67	Pengelola Pendapatan	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
68	Pengadministrasi Umum	Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156

C. KLASIFIKASI III

1. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
3	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
7	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
8	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
11	Perisalah Legislatif Muda	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
12	Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat DPRD	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
13	Analisis Kebijakan Pertama	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
14	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
15	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
17	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Perisalah Legislatif Muda	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
19	Perisalah Legislatif Pertama	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
20	Analisis Hukum Muda	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
21	Analisis Hukum Pertama	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
22	Pranata Komputer Muda	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
23	Pranata Komputer Pertama	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
24	Pranata Komputer Penyelia	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
25	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Sekretariat DPRD	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
26	Pranata Komputer Pelaksana	Sekretariat DPRD	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
27	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Sekretariat DPRD	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
28	Penata Laksana Barang Penyelia	Sekretariat DPRD	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
29	Penata Laksana Barang Mahir	Sekretariat DPRD	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
30	Penata Laksana Barang Terampil	Sekretariat DPRD	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
31	Analisis Tata Laksana	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
32	Pengelola Teknologi Informasi	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
33	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
34	Pengadministrasi Umum	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
35	Ajudan	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%	25%		Rp 3.817.631
36	Pramu Bakti	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
38	Analisis Protokol	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
39	Analisis Publikasi	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
40	Pengelola Bangunan Gedung	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
41	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
42	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
43	Operator Mesin	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
44	Teknisi Listrik dan Jaringan	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
45	Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
46	Pengemudi VIP	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%	25%		Rp 3.183.788
47	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
48	Pengadministrasi Umum	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
49	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
50	Pengemudi	Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
51	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Bagian Keuangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
52	Pengelola Bahan Perencanaan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
53	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Bagian Keuangan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
54	Bendahara	Bagian Keuangan	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
55	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Bagian Keuangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Verifikator Keuangan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
57	Pengelola Perjalanan Dinas	Bagian Keuangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
58	Pengelola Keuangan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengelola Laporan Keuangan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
60	Pengelola Program dan Laporan	Bagian Keuangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
61	Pengadministrasi Keuangan	Bagian Keuangan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
62	Pengadministrasi Umum	Bagian Keuangan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
63	Analisis Legislasi	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
64	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
65	Notulis Rapat	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
66	Pranata Jamuan	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
67	Pengadministrasi Rapat	Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

2. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Mutasi, Data dan Informasi / Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Pengembangan dan Formasi Aparatur / Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
7	Analisis Kepegawaian Muda	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Analisis Kepegawaian Muda	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
10	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Widyaiswara Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
14	Widyaiswara Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
15	Pranata Komputer Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
16	Pranata Komputer Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
17	Pranata Komputer Penyelia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
18	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
19	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
20	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
21	Arsiparis Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
22	Arsiparis Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
23	Arsiparis Penyelia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
24	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
25	Arsiparis Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Analisis Kepegawaian Muda	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Analisis Kepegawaian Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
28	Analisis Kepegawaian Penyelia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
29	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
30	Analisis Kepegawaian Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
31	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
32	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
33	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
34	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
35	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
36	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
39	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
40	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
41	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
42	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
43	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
44	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
45	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
46	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
47	Analisis Data dan Informasi	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
48	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
49	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
50	Pengelola Disiplin Pegawai	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Pengelola Kepegawaian	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
52	Pengadministrasi Kepegawaian	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
54	Penyusun Rencana Mutasi	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
55	Penyusun Program Perencanaan Diklat	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
56	Analisis Pengembangan Karir	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
57	Pengelola Pengembangan Karir	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
58	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengelola Kepegawaian	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
60	Pengadministrasi Pelatihan	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
61	Pengadministrasi Kepegawaian	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
62	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**3. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	Bidang Kewaspadaan Nasional	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Politik	Bidang Politik	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi	Sub Bidang Bina Ideologi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
11	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
12	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Sub Bidang Penanganan Konflik	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
13	Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan	Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
14	Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu	Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
15	Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya	Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
16	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi	Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
17	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
18	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kewaspadaan Nasional	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
19	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Politik	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
20	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Analisis Kebijakan Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
22	Analisis Kebijakan Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
23	Pranata Komputer Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
24	Pranata Komputer Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
25	Pranata Komputer Penyelia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
27	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
28	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
29	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
30	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
31	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
32	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
33	Analisis Perencanaan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
34	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
35	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
36	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
37	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
38	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
39	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
40	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
41	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
42	Analisis Kerja Sama	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
43	Pengolah Data	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
44	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Analisis Wawasan Kebangsaan	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
46	Pengolah Data	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
47	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
48	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bidang Kewaspadaan Nasional	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
49	Pengolah Data	Bidang Kewaspadaan Nasional	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
50	Pengadministrasi Umum	Bidang Kewaspadaan Nasional	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
51	Analisis Pengaduan Masyarakat	Bidang Kewaspadaan Nasional	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
52	Pengolah Data	Bidang Kewaspadaan Nasional	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Kewaspadaan Nasional	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
54	Analisis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Bidang Politik	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
55	Pengelola Pendidikan	Bidang Politik	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
56	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Politik	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
57	Analisis Partai Politik	Bidang Politik	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
58	Pengolah Data	Bidang Politik	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengadministrasi Umum	Bidang Politik	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
60	Analisis Kerjasama Kebudayaan	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
61	Pengelola Adat dan Kesenian	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
62	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Analisis Organisasi Masyarakat	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
64	Pengolah Data	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
65	Pengadministrasi Umum	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

4. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Rp 12.305.413	100%	65%		Rp 20.303.932
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	55%		Rp 13.688.013
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
4	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	11	Rp 6.827.448	100%	55%		Rp 10.582.545
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
8	Pranata Komputer Muda	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
9	Pranata Komputer Muda	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
10	Pranata Komputer Muda	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	9	Rp 5.166.121	100%	45%		Rp 7.490.875
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
11	Pranata Komputer Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
12	Pranata Komputer Pertama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
13	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
14	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
15	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	Rp 3.181.359	100%	15%		Rp 3.658.563
16	Administrator Database Kependudukan Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
17	Administrator Database Kependudukan Pertama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
18	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
20	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
21	Operator SIAK Penyelia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		#N/A	100%	15%		#N/A
22	Operator SIAK Mahir	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		#N/A	100%	15%		#N/A
23	Operator SIAK Terampil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		#N/A	100%	15%		#N/A
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
24	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%	35%		Rp 4.942.339
25	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
26	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
27	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
28	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
29	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
30	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
31	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
32	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
33	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
34	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
35	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
36	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
37	Pengelola Mutasi Penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
38	Pengadministrasi Kependudukan	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
39	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
41	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
42	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
43	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
44	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
45	Pengelola Teknologi Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
46	Pengolah Data	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
47	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
48	Pengadministrasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
49	Pengadministrasi Umum	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156

5. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala UPT Instalasi Farmasi	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
12	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
14	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Bidang Kesehatan Masyarakat	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
15	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	Bidang Kesehatan Masyarakat	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
16	Epidemiolog Muda	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
17	Administrator Kesehatan Muda	Bidang Pelayanan Kesehatan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
18	Administrator Kesehatan Muda	Bidang Sumber Daya Kesehatan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
19	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
20	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
21	Epidemiolog Muda	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
22	Epidemiolog Muda	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
23	Administrator Kesehatan Muda	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
24	Administrator Kesehatan Muda	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
25	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	Dinas Kesehatan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
26	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Perawat Penyelia	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
29	Perawat Pelaksana Lanjutan	Dinas Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
30	Perawat Pelaksana	Dinas Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
31	Pranata Komputer Muda	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
32	Pranata Komputer Pertama	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
33	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
34	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
35	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
36	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
37	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
38	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
39	Apoteker Madya	UPT Instalasi Farmasi	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
40	Apoteker Muda	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
41	Apoteker Pertama	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
42	Administrator Kesehatan Madya	UPT Instalasi Farmasi	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
43	Administrator Kesehatan Muda	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
44	Administrator Kesehatan Pertama	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
45	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	UPT Instalasi Farmasi	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
46	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
47	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
48	Asisten Apoteker Penyelia	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
49	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	UPT Instalasi Farmasi	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
50	Asisten Apoteker Pelaksana	UPT Instalasi Farmasi	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
51	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	UPT Instalasi Farmasi	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
52	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Instalasi Farmasi	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
53	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Instalasi Farmasi	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
54	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Instalasi Farmasi	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
55	Dokter Pertama	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
56	Dokter Muda	UPT Laboratorium Kesehatan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
57	Dokter Madya	UPT Laboratorium Kesehatan	12	Rp 8.830.976	95%	10%		Rp 9.272.525
58	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
59	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	UPT Laboratorium Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
60	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	UPT Laboratorium Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
61	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
62	Sanitarian Madya	UPT Laboratorium Kesehatan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Sanitarian Muda	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
64	Sanitarian Pertama	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
65	Sanitarian Penyelia	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
66	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	UPT Laboratorium Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
67	Sanitarian Pelaksana	UPT Laboratorium Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
68	Sanitarian Pelaksana Pemula	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
69	Administrator Kesehatan Madya	UPT Laboratorium Kesehatan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
70	Administrator Kesehatan Muda	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
71	Administrator Kesehatan Pertama	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
72	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Laboratorium Kesehatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
73	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Laboratorium Kesehatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
74	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Laboratorium Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
75	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
76	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
77	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
78	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
79	Pengelola Pelaksanaan dan Tinak Lanjut Pemeriksaan Anggaran Pos dan Informatika	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
80	Pengelola Bahan Perencanaan Program Pos dan Informatika	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
81	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
82	Analisis keuangan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
83	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
84	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
85	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
86	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
88	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
89	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
90	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
91	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
92	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
93	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
94	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
95	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Bidang Kesehatan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
96	Analisis Gizi	Bidang Kesehatan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
97	Analisis Data dan Informasi	Bidang Kesehatan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
98	Analisis Kesehatan Kerja	Bidang Kesehatan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
99	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
100	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
101	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
102	Pengelola Penyehatan Lingkungan	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
103	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	Bidang Kesehatan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
104	Pengadministrasi Umum	Bidang Kesehatan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
105	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
106	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
107	Pengelola Program Imunisasi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
108	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Pengelola Penyakit Tidak Menular	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
110	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
111	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
112	Pengadministrasi Umum	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
113	Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
114	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
115	Analisis Penilaian dan Akreditasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
116	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
117	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
118	Pengelola Rujukan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
119	Pengelola Dokumen Perizinan	Bidang Pelayanan Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
120	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
121	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
122	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
123	Analisis Data dan Informasi	Bidang Sumber Daya Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
124	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Sumber Daya Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
125	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Bidang Sumber Daya Kesehatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
126	Pengelola Kefarmasian	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
127	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
128	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
129	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	Bidang Sumber Daya Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
130	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Sumber Daya Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
131	Pengadministrasi Umum	Bidang Sumber Daya Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
132	Pengelola Keuangan	UPT Instalasi Farmasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
133	Pengelola Kepegawaian	UPT Instalasi Farmasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
134	Pengadministrasi Keuangan	UPT Instalasi Farmasi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
135	Pengadministrasi Kepegawaian	UPT Instalasi Farmasi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
136	Pengadministrasi Umum	UPT Instalasi Farmasi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	Pengemudi	UPT Instalasi Farmasi	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
138	Pengelola Keuangan	UPT Laboratorium Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
139	Pengelola Kepegawaian	UPT Laboratorium Kesehatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
140	Pengadministrasi Keuangan	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
141	Pengadministrasi Kepegawaian	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
142	Pengadministrasi Umum	UPT Laboratorium Kesehatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
143	Pengemudi	UPT Laboratorium Kesehatan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109

**6. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	Bidang Pembinaan Kebudayaan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset	Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan PAUD dan PNF	Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan PAUD dan PNF	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
12	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar	Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
13	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
14	Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama	Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
15	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
16	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
18	Pamong Budaya Muda	Bidang Pembinaan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
19	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
20	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
21	Pamong Budaya Muda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
22	Pamong Budaya Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
23	Pranata Komputer Muda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
24	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
25	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
27	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
28	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
29	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
30	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
31	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
32	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
33	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
34	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
35	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
36	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
38	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
39	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
40	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
41	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
43	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
44	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengelola Gaji	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
47	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
48	Penyusun Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
49	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
50	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
51	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
52	Pengadministrasi Umum	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
53	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
54	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
55	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
57	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
58	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
60	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
61	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
62	Analisis Pengembangan Peserta Didik	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
63	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
64	Pengelola Peserta Didik	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
65	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
66	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
67	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
68	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
69	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
70	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
71	Analisis Eksplorasi Cagar Budaya	Bidang Pembinaan Kebudayaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
72	Analisis Budaya	Bidang Pembinaan Kebudayaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pembinaan Kebudayaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
74	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Kebudayaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
75	Pengelola Data Ekspresi Budaya Tradisional	Bidang Pembinaan Kebudayaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
76	Pengelola Data Sejarah	Bidang Pembinaan Kebudayaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
77	Pengelola Adat dan Kesenian	Bidang Pembinaan Kebudayaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
78	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Pembinaan Kebudayaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
79	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	Bidang Pembinaan Kebudayaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
80	Juru Pelestari Cagar Budaya	Bidang Pembinaan Kebudayaan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
81	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
82	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
83	Analisis Pengembangan Peserta Didik	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
84	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
85	Pengelola Peserta Didik	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
86	Pengolah Data	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
87	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
88	Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
89	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
91	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

7. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
9	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Destinasi Pariwisata	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
10	Analisis Kebijakan Muda	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
11	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pemasaran Pariwisata	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
12	Analisis Kebijakan Muda	Dinas Pariwisata	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
13	Analisis Kebijakan Pertama	Dinas Pariwisata	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
14	Pranata Komputer Muda	Dinas Pariwisata	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
15	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pariwisata	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
16	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pariwisata	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
17	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pariwisata	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
18	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pariwisata	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
19	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pariwisata	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
20	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pariwisata	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
21	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pariwisata	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
22	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pariwisata	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
23	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
24	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
25	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
26	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
28	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
29	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
30	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
31	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
32	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
33	Pengawas Kepariwisataaan	Bidang Destinasi Pariwisata	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
34	Analisis Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
35	Pengolah Data	Bidang Destinasi Pariwisata	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
36	Pengelola Informasi Kepariwisataaan	Bidang Destinasi Pariwisata	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pemandu Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
38	Pengadministrasi Umum	Bidang Destinasi Pariwisata	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
39	Pengawas Perhotelan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
40	Analisis Data dan Informasi	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
41	Pengelola Usaha Kepariwisataaan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
42	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
43	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pemasaran Pariwisata	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
44	Pengelola Informasi Kepariwisataaan	Bidang Pemasaran Pariwisata	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengelola Promosi dan Infomasi Wisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
47	Pemandu Wisata	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
48	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
49	Bendahara	UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
50	Pengadministrasi Umum	UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
51	Petugas Keamanan	UPT Pengelola Objek Wisata Pantai Takisung	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109

**8. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
10	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
12	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
14	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
17	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
18	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
19	Pengawas Bibit Ternak Muda	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
20	Pengawas Bibit Ternak Muda	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
21	Pengawas Mutu Pakan Muda	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
22	Medik Veteriner Muda	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
23	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
24	Analisis Kebijakan Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
25	Analisis Kebijakan Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
28	Medik Veteriner Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
29	Medik Veteriner Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
30	Medik Veteriner Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
31	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
33	Pengawas Bibit Ternak Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
34	Pengawas Bibit Ternak Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
35	Pengawas Mutu Pakan Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
36	Pengawas Mutu Pakan Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
37	Pengawas Mutu Pakan Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
38	Paramedik Veteriner Penyelia	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
39	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
40	Paramedik Veteriner Pelaksana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
41	Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
42	Pranata Komputer Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
43	Pranata Komputer Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
44	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
45	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
46	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
47	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
48	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
49	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
50	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
52	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
53	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
54	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
55	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
56	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
57	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
58	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
60	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
61	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
62	Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
63	Penyusun Promosi dan Kerjasama	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
64	Pengelola Database	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
65	Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewananan	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
66	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
67	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
68	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
69	Pengadministrasi Umum	Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Pengawas Mutu Bibit Ternak	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
71	Penyusun Pembinaan dan Pola Pelaksanaan Pengadaan Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
72	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
73	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
74	Pengolah Data	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
75	Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
76	Pengelola Peternakan	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
77	Pengadministrasi Umum	Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
78	Analisis Pengawasan Mutu Produk	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
79	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
80	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
81	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
82	Pengelola Pasca Panen	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
84	Pengelola Usaha Pemotongan Ternak atau Unggas dan Lalu Lintas Daging	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
85	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
86	Pengadministrasi Umum	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
87	Pengelola UPTD Pasar Hewan Dan Rumah Potong Hewan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
88	Pengelola Usaha Pemotongan Ternak atau Unggas dan Lalu Lintas Daging	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
89	Pengadministrasi Penerimaan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
90	Pengadministrasi Umum	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
91	Juru Pungut Retribusi	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
92	Petugas Keamanan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
93	Pramu Kebersihan	UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978
94	Pengadministrasi Umum	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
95	Petugas Keamanan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
96	Pramu Kebersihan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Batu Ampar	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Pengadministrasi Umum	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
98	Petugas Keamanan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
99	Pramu Kebersihan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Takisung	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978
100	Pengadministrasi Umum	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
101	Petugas Keamanan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
102	Pramu Kebersihan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Panyipatan	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978
103	Pengadministrasi Umum	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
104	Petugas Keamanan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
105	Pramu Kebersihan	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kurau	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978

9. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Bina Marga	Bidang Bina Marga	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
13	Teknik Pengairan Muda	Bidang Sumber Daya Air	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
14	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	Bidang Bina Marga	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
15	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
16	Penata Ruang Muda	Bidang Tata Ruang	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
17	Penata Ruang Muda	Bidang Pertanahan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
18	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
20	Teknisi Pengairan Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
21	Teknisi Pengairan Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
22	Teknisi Jalan dan Jembatan Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
23	Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
24	Penata Ruang Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
25	Penata Ruang Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Pranata Komputer Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
28	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
29	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
30	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
31	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
32	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
33	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
34	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
35	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
36	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
39	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
40	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
41	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
42	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
43	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
44	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
47	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
48	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
49	Analisis Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
50	Pengawas Pengairan	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
51	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
52	Pengelola Pengairan	Bidang Sumber Daya Air	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
53	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
54	Teknisi Air	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
55	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
56	Pengadministrasi Umum	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Pengawas Jalan dan Jembatan	Bidang Bina Marga	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
58	Penyusun Rencana Pengawasan	Bidang Bina Marga	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
59	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
60	Pengelola Pemeliharaan Jalan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
61	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
62	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Marga	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
63	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
64	Pemeriksa Sanitasi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
65	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
66	Penelaah Mutu Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
67	Pengolah Data	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
68	Pengelola Jasa Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
69	Pengadministrasi Umum	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
70	Analisis Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
71	Penyusun Rencana Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
72	Pengawas Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
73	Pengelola Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
74	Pengadministrasi Umum	Bidang Tata Ruang	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
75	Pengemudi	Bidang Tata Ruang	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Bidang Pertanahan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
77	Pengelola Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan	Bidang Pertanahan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
78	Pengadministrasi Pertanahan	Bidang Pertanahan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
79	Pengelola Laporan Data Penerimaan	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
80	Pengelola Laboratorium	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
81	Operator Alat Berat	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
82	Teknisi Laboratorium	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
83	Pengadministrasi Umum	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**10. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan / Kepala Bidang Tata Kota	Bidang Tata Kota	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	UPT Laboratorium Lingkungan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan	UPT Laboratorium Lingkungan	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Kepala UPTD Kebersihan	UPTD Kebersihan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebersihan	UPTD Kebersihan	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
15	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
16	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Tata Kota	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
17	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Bidang Tata Kota	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
18	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Bidang Tata Lingkungan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
19	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
20	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
21	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
22	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
23	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
24	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
28	Pranata Komputer Muda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
29	Pranata Komputer Pertama	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
30	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
31	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
32	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
33	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
34	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
35	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
36	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
38	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
43	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	UPT Laboratorium Lingkungan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
44	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	UPT Laboratorium Lingkungan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
45	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	UPT Laboratorium Lingkungan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
46	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	UPT Laboratorium Lingkungan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
47	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	UPT Laboratorium Lingkungan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
48	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
49	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
50	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
51	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
52	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
53	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
55	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
56	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
57	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
58	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
60	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
61	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
62	Petugas Keamanan	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
63	Pramu Kebersihan	Sekretariat	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978
64	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
65	Analisis Penataan Kawasan	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
66	Pengawas Fisik Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
68	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
69	Juru Survei Permukiman Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
70	Pengadministrasi Umum	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
71	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
72	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
73	Pengawas Tata Pertamanan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
74	Pengelola Penerangan Jalan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
75	Pengelola Limbah	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
76	Pengolah Data	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
77	Pemelihara Penerangan Jalan	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
78	Pranata Taman	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
79	Pengadministrasi Umum	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Juru Pungut Retribusi	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
81	Pramu Taman	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978
82	Analisis Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
83	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Bidang Tata Lingkungan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
84	Pengelola Informasi Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
85	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
86	Penata Gambar	Bidang Tata Lingkungan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
87	Kartografer	Bidang Tata Lingkungan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
88	Pengadministrasi Umum	Bidang Tata Lingkungan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
89	Analisis Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
90	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
91	Pengelola Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
92	Pengelola Informasi Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Pengolah Data	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
94	Pengadministrasi Umum	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
95	Analisis Pengaduan Masyarakat	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
96	Analisis Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
97	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
98	Pengelola Pengaduan Publik	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
99	Pengelola Lingkungan	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
100	Pengadministrasi Umum	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
101	Pramu Kebersihan	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978
102	Pengolah Data	UPT Laboratorium Lingkungan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
103	Pranata Laboratorium Kearsipan	UPT Laboratorium Lingkungan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
104	Pengadministrasi Umum	UPT Laboratorium Lingkungan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
105	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	UPTD Kebersihan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Pengawas lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	UPTD Kebersihan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
107	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	UPTD Kebersihan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
108	Pengelola Laporan Data Penerimaan	UPTD Kebersihan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
109	Operator Alat Berat	UPTD Kebersihan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
110	Pengadministrasi Umum	UPTD Kebersihan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
111	Juru Pungut Retribusi	UPTD Kebersihan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
112	Pramu Kebersihan	UPTD Kebersihan	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978

**11. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	UPT Balai Latihan Kerja	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja	UPT Balai Latihan Kerja	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
10	Instruktur Muda	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Pengantar Kerja Muda	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
12	Mediator Hubungan Industrial Muda	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
13	Pengantar Kerja Muda	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
14	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Bidang Perindustrian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
15	Instruktur Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.166.121	95%	10%	30%	Rp 6.974.263
16	Instruktur Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.152.215	95%	10%	30%	Rp 5.605.490
17	Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
18	Pengantar Kerja Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
19	Mediator Hubungan Industrial Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
20	Mediator Hubungan Industrial Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
21	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
22	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Pranata Komputer Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
24	Pranata Komputer Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
25	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
27	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
28	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
29	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
30	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
31	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
32	Instruktur Madya	UPT Balai Latihan Kerja	11	Rp 6.827.448	95%	10%	30%	Rp 9.217.055
33	Instruktur Muda	UPT Balai Latihan Kerja	9	Rp 5.166.121	95%	10%	30%	Rp 6.974.263
34	Instruktur Pertama	UPT Balai Latihan Kerja	8	Rp 4.152.215	95%	10%	30%	Rp 5.605.490
35	Instruktur Penyelia	UPT Balai Latihan Kerja	8	Rp 4.152.215	95%	10%	30%	Rp 5.605.490
36	Instruktur Pelaksana Lanjutan	UPT Balai Latihan Kerja	7	Rp 3.660.991	95%	10%	30%	Rp 4.942.339
37	Instruktur Pelaksana	UPT Balai Latihan Kerja	6	Rp 3.181.359	95%	10%	30%	Rp 4.294.835
38	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Balai Latihan Kerja	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
39	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Balai Latihan Kerja	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
40	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Balai Latihan Kerja	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
41	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
42	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
43	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
44	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengelola Gaji	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
47	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
48	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
50	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
51	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
52	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
53	Analisis Bahan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
54	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
55	Analisis Bahan Pengembangan Model Kesempatan Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
56	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
57	Pengelola Penempatan TKI	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
58	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
60	Analisis Bahan Persyaratan Kerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
61	Analisis Bahan Pengupahan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
62	Analisis Bahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
63	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
64	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
65	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
66	Pengelola Data	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
67	Pengadministrasi Umum	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
68	Analisis Industri	Bidang Perindustrian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Analisis Fasilitas Litbang Teknologi Industri	Bidang Perindustrian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
70	Pengolah Data	Bidang Perindustrian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
71	Pengelola Sarana Perindustrian	Bidang Perindustrian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
72	Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	Bidang Perindustrian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
73	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Perindustrian	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
74	Pengadministrasi Umum	Bidang Perindustrian	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
75	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	UPT Balai Latihan Kerja	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
76	Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan	UPT Balai Latihan Kerja	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
77	Pengadministrasi Keuangan	UPT Balai Latihan Kerja	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
78	Pengadministrasi Umum	UPT Balai Latihan Kerja	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499



**12. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Hortikultura	Bidang Hortikultura	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Perkebunan	Bidang Perkebunan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
11	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
12	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
13	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Tanaman Pangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
14	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
15	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Hortikultura	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
17	Pengawas Benih Tanaman Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
18	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Bidang Perkebunan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
20	Penyuluh Pertanian Muda	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
21	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
22	Pengawas Benih Tanaman Muda	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
23	Pengawas Benih Tanaman Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
24	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
25	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
28	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
29	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
30	Penyuluh Pertanian Madya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
31	Penyuluh Pertanian Muda	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
32	Penyuluh Pertanian Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
33	Penyuluh Pertanian Penyelia	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
34	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
35	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
36	Pranata Komputer Muda	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
37	Pranata Komputer Pertama	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
39	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
40	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
41	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
42	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
43	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
44	Penyuluh Pertanian Madya	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
45	Penyuluh Pertanian Muda	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
46	Penyuluh Pertanian Pertama	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
47	Penyuluh Pertanian Penyelia	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
48	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
49	Penyuluh Pertanian Pelaksana	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
50	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
51	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
52	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
53	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
54	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
55	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
56	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
58	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
60	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
61	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
62	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
63	Pramu Bakti	Sekretariat	1	Rp 849.981	95%	25%		Rp 1.019.978
64	Analisis Data dan Informasi	Bidang Tanaman Pangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
65	Analisis Program Pembangunan Pertanian	Bidang Tanaman Pangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
66	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	Bidang Tanaman Pangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
67	Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta Sayuran	Bidang Tanaman Pangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
68	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
69	Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
70	Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas Tanaman	Bidang Tanaman Pangan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
71	Pengadministrasi Umum	Bidang Tanaman Pangan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
72	Analisis Data dan Informasi	Bidang Hortikultura	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
73	Analisis Potensi Budidaya Serealia	Bidang Hortikultura	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
74	Pengelola Data Penilaian Varietas	Bidang Hortikultura	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
75	Pengelola Perencanaan dan Pelaporan Usaha Tani	Bidang Hortikultura	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	Bidang Hortikultura	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
77	Pengolah Data	Bidang Hortikultura	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
78	Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	Bidang Hortikultura	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
79	Pengadministrasi Umum	Bidang Hortikultura	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
80	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	Bidang Perkebunan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
81	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	Bidang Perkebunan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
82	Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih atau Bibit	Bidang Perkebunan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
83	Pengolah Data	Bidang Perkebunan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
84	Pengelola Data Kelembagaan Benih	Bidang Perkebunan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
85	Pengadministrasi Umum	Bidang Perkebunan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
86	Analisis Data dan Informasi	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
87	Pengawas Pupuk dan Pestisida	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
88	Analisis Lahan Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
89	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
90	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
91	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
92	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
93	Pengadministrasi Umum	Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
94	Pengadministrasi Keuangan	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	Pengadministrasi Umum	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
96	Petugas Keamanan	UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109

**13. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
7	Kepala Seksi Lalu Lintas	Seksi Lalu Lintas	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Seksi Angkutan	Seksi Angkutan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Seksi Prasarana	Seksi Prasarana	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan	Seksi Keselamatan dan Pengembangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Kepala UPT Pelabuhan	UPT Pelabuhan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelabuhan	UPT Pelabuhan	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
13	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
15	Kepala UPT Terminal dan Perparkiran	UPT Terminal dan Perparkiran	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Terminal dan Perparkiran	UPT Terminal dan Perparkiran	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
17	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
18	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Prasarana dan Keselamatan	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
19	Analisis Kebijakan Muda	Dinas Perhubungan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
20	Analisis Kebijakan Pertama	Dinas Perhubungan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
21	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Perhubungan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
22	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Perhubungan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
23	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Perhubungan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
24	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Perhubungan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
25	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Perhubungan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
26	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Perhubungan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
27	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Perhubungan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
28	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8	Rp 4.152.215	95%	10%	30%	Rp 5.605.490
29	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	7	Rp 3.660.991	95%	10%	30%	Rp 4.942.339
30	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Rp 3.181.359	95%	10%	30%	Rp 4.294.835

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	5	Rp 2.653.156	95%	10%	30%	Rp 3.581.761
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
32	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
33	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
34	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
35	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
36	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
37	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
38	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
39	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
40	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
41	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
42	Analisis Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
43	Analisis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
44	Penelaah Andalalin	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
45	Pengelola Data Jaringan Lintas Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
47	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
48	Pengadministrasi LLAJ	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
49	Analisis Angkutan Darat	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
50	Pengevaluasi Pelayanan Angkutan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
51	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
52	Pengawas dan Pembina Angkutan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
53	Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
54	Teknisi Survei Angkutan Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
55	Teknisi Survei Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Pengadministrasi Kedadatangan dan Keberangkatan Kapal	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
57	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
58	Pengelola Sertifikasi Desain Teknis Perlengkapan Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengelola Data Alur dan Perambuan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
60	Pengelola Penerangan Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
61	Pengolah Data	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
62	Pemelihara Penerangan Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
63	Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
64	Analisis Keselamatan Transportasi Jalan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
65	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
66	Pengelola Pengawasan LLAJ	Bidang Prasarana dan Keselamatan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
67	Pengadministrasi Umum	Bidang Prasarana dan Keselamatan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
68	Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	UPT Pelabuhan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
69	Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	UPT Pelabuhan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
70	Pengadministrasi Umum	UPT Pelabuhan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
71	Petugas Keamanan	UPT Pelabuhan	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
72	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
73	Pengelola Data	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
74	Pengadministrasi Umum	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
75	Petugas Keamanan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
76	Pengawas Angkutan dan Terminal	UPT Terminal dan Perparkiran	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
77	Pengelola Perparkiran	UPT Terminal dan Perparkiran	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
78	Pengadministrasi Karcis	UPT Terminal dan Perparkiran	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
79	Pengadministrasi Umum	UPT Terminal dan Perparkiran	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
80	Petugas Keamanan	UPT Terminal dan Perparkiran	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109

**14. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Komunikasi	Bidang Komunikasi	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Bidang Penyelenggaraan E-Government	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Bidang Statistik dan Persandian	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik	Seksi Pengelolaan Statistik	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
10	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Bidang Komunikasi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Pranata Komputer Muda	Bidang Penyelenggaraan E-Government	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
12	Pranata Komputer Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
13	Pranata Komputer Pertama	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
14	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
15	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
16	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
17	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
18	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
19	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
20	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
21	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
22	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
23	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Sandiman Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
25	Sandiman Pelaksana Lanjutan	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
26	Sandiman Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
27	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
28	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
29	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
30	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
31	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
32	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
33	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
34	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
35	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
36	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
38	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
39	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
40	Pengawas Telekomunikasi	Bidang Komunikasi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
41	Analisis Publikasi	Bidang Komunikasi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
42	Operator Radio	Bidang Komunikasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
43	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Bidang Komunikasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
44	Pengolah Data	Bidang Komunikasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Jurnalis	Bidang Komunikasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Komunikasi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
47	Pengawas Teknologi Informasi	Bidang Penyelenggaraan E-Government	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
48	Pengelola Database	Bidang Penyelenggaraan E-Government	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
49	Pengelola Situs atau Web	Bidang Penyelenggaraan E-Government	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Pengelola Sistem dan Jaringan	Bidang Penyelenggaraan E-Government	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
51	Teknisi Jaringan Instalasi	Bidang Penyelenggaraan E-Government	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
52	Teknisi Produksi Multimedia dan Web	Bidang Penyelenggaraan E-Government	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
53	Analisis Statistik	Bidang Statistik dan Persandian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
54	Pengelola Data Statistik	Bidang Statistik dan Persandian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
55	Pengadministrasi Umum	Bidang Statistik dan Persandian	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
56	Analisis Data dan Informasi	Bidang Statistik dan Persandian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
57	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Bidang Statistik dan Persandian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
58	Operator Sandi dan Telekomunikasi	Bidang Statistik dan Persandian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

**15. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
10	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
11	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
12	Analisis Akuakultur Muda	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
13	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	Bidang Perikanan Tangkap	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
14	Analisis Ketahanan Pangan Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
15	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
16	Analisis Akuakultur Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
17	Analisis Akuakultur Pertama	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
18	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
19	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
20	Pengawas Perikanan Madya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
21	Pengawas Perikanan Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
22	Pengawas Perikanan Pertama	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
23	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
25	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
26	Pranata Komputer Muda	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Pranata Komputer Pertama	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
28	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
29	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
30	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
31	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
32	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
33	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
34	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
35	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
36	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
38	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
39	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
40	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
41	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
42	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
43	Analisis Pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
44	Pengelola Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengelola Pola Pangan Harapan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
47	Pengadministrasi Umum	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
49	Analisis Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
50	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
51	Pengelola Pengendalian Keamanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
52	Pengadministrasi Umum	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
53	Analisis Perikanan Budidaya	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
54	Analisis Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
55	Pengelola Teknis Perikanan Budidaya	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
56	Pengelola Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
57	Teknisi Perikanan Budidaya	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
58	Teknisi Konservasi Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengembangan Usaha Perikanan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
59	Analisis Kenelayanan	Bidang Perikanan Tangkap	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
60	Analisis Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Bidang Perikanan Tangkap	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
61	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Bidang Perikanan Tangkap	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
62	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	Bidang Perikanan Tangkap	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
63	Pengadministrasi Umum	Bidang Perikanan Tangkap	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

16. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan / Kepala Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan / Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
8	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Bidang Bina Pemerintahan Desa	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
12	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
13	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
14	Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
15	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
17	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Pranata Komputer Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
19	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
20	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
21	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
22	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
23	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
24	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
25	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
27	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
28	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
29	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
30	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
31	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
32	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
33	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
34	Pengelola Barang Milik Negara	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
35	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
36	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
38	Analisis Data dan Informasi	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
39	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
40	Penyusun Program Pembinaan Lingkungan Budaya	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
41	Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
42	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
43	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
44	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
46	Analisis Data dan Informasi	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
47	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
48	Analisis Keuangan	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
49	Analisis Laporan Keuangan	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
50	Analisis Aset Daerah	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
51	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
52	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
53	Pengelola Anggaran	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
54	Pengelola Data Pencairan Dana	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
55	Pengelola Data Statistik	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
57	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
58	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	Bidang Bina Pemerintahan Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
59	Analisis Kerja Sama	Bidang Bina Pemerintahan Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
60	Analisis Penataan Kawasan	Bidang Bina Pemerintahan Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
61	Analisis Desa dan Kelurahan	Bidang Bina Pemerintahan Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
62	Analisis Data dan Informasi	Bidang Bina Pemerintahan Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
63	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	Bidang Bina Pemerintahan Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
64	Analisis Pemilihan Umum	Bidang Bina Pemerintahan Desa	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
65	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Bina Pemerintahan Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
66	Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan Paten	Bidang Bina Pemerintahan Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
67	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Bidang Bina Pemerintahan Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
68	Pengelola Informasi Kerjasama	Bidang Bina Pemerintahan Desa	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
69	Pengadministrasi Batas Wilayah	Bidang Bina Pemerintahan Desa	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
70	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Bina Pemerintahan Desa	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
71	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Pemerintahan Desa	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

17. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
7	Pekerja Sosial Muda	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Pekerja Sosial Muda	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
9	Pekerja Sosial Muda	Dinas Sosial	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
10	Pekerja Sosial Pertama	Dinas Sosial	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
11	Pranata Komputer Muda	Dinas Sosial	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
12	Pranata Komputer Pertama	Dinas Sosial	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
13	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Sosial	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
14	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Sosial	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
15	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Sosial	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Sosial	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
17	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Sosial	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
18	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Sosial	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
21	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
22	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
24	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
25	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
27	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
28	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
29	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
30	Konselor	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
31	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
32	Pengelola Perlindungan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
33	Pranata Bencana	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
34	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
35	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
36	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
37	Pengadministrasi Umum	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
38	Analisis Pelayanan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
39	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
40	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
41	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
42	Pengelola Data Bantuan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
43	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**18. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Kepemudaan	Bidang Kepemudaan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Keolahragaan	Bidang Keolahragaan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
7	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kepemudaan	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
8	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Keolahragaan	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
9	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Kepemudaan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
10	Analisis Kebijakan Pertama	Bidang Keolahragaan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
11	Pranata Komputer Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
12	Pranata Komputer Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
13	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
14	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
15	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
16	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
17	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
18	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
19	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
21	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
22	Pengelola Gaji	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
23	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
25	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
26	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
27	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
28	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
29	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
30	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
31	Penyuluh Kepemudaan	Bidang Kepemudaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
32	Analisis Data dan Informasi	Bidang Kepemudaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
33	Analisis Kepemudaan	Bidang Kepemudaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
34	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Bidang Kepemudaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
35	Pengolah Data	Bidang Kepemudaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
36	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	Bidang Kepemudaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Kepemudaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
38	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Bidang Kepemudaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
39	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Kepemudaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
40	Pengadministrasi Umum	Bidang Kepemudaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
41	Penyuluh Olah Raga	Bidang Keolahragaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
42	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Bidang Keolahragaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
43	Analisis Keolahragaan	Bidang Keolahragaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
44	Pengolah Data	Bidang Keolahragaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengawas Olah Raga	Bidang Keolahragaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
46	Pelatih Atlet	Bidang Keolahragaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
47	Pengadministrasi Umum	Bidang Keolahragaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**19. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
7	Pustakawan Muda	Bidang Perpustakaan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Arsiparis Muda	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
9	Arsiparis Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
10	Arsiparis Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
11	Arsiparis Pertama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
12	Arsiparis Penyelia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
13	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
14	Arsiparis Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
15	Pustakawan Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
16	Pustakawan Pertama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
17	Pustakawan Penyelia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
18	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
19	Pustakawan Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
20	Pranata Komputer Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
21	Pranata Komputer Pertama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
22	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
23	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
24	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
26	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
28	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
29	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
30	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
31	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
32	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
33	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
34	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
35	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
36	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
37	Pengemudi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
38	Analisis Data dan Informasi	Bidang Perpustakaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
39	Penyuluh Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
40	Pengawas Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
41	Pengolah Data	Bidang Perpustakaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
42	Pengelola Pustaka Elektronik	Bidang Perpustakaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
43	Pengelola Bahan Pustaka	Bidang Perpustakaan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
44	Pengadministrasi Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
45	Penyuluh Kearsipan	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
46	Analisis Data dan Informasi	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
47	Pranata Reproduksi Arsip	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
48	Pranata Restorasi Arsip	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
49	Pengelola Dokumentasi	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
50	Jurnalis	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Pranata Kearsipan	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
52	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

20. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
11	Pranata Komputer Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
12	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
14	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
15	Analisis Kebijakan Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
16	Analisis Kebijakan Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
17	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
18	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
19	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
21	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
22	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
23	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
24	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Pengolah Data Laporan Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
26	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
27	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
28	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
29	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
30	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
31	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
32	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
33	Analisis Data dan Informasi	Bidang Penanaman Modal	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
34	Pengawas Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
35	Pengelola Permodalan dan Investasi	Bidang Penanaman Modal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
36	Pengolah Data	Bidang Penanaman Modal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Pengadministrasi Akses Permodalan	Bidang Penanaman Modal	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
39	Pengadministrasi Umum	Bidang Penanaman Modal	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
40	Analisis Data dan Informasi	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
41	Pengolah Data	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
42	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
43	Pengadministrasi Umum	Bidang Data, Informasi dan Pengaduan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
44	Analisis Data dan Informasi	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
45	Pengelola Perizinan	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengadministrasi Perizinan	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
47	Analisis Data dan Informasi	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
48	Pengelola Perizinan	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
49	Pengadministrasi Perizinan	Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**21. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
9	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
10	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
11	Analisis Kebijakan Muda	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
12	Analisis Kebijakan Muda	DP2KBP3A	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
13	Analisis Kebijakan Pertama	DP2KBP3A	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
14	Pranata Komputer Muda	DP2KBP3A	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
15	Pranata Komputer Pertama	DP2KBP3A	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
16	Pranata Komputer Penyelia	DP2KBP3A	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
17	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	DP2KBP3A	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
18	Pranata Komputer Pelaksana	DP2KBP3A	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
19	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	DP2KBP3A	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
20	Bidan Madya	DP2KBP3A	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
21	Bidan Muda	DP2KBP3A	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
22	Bidan Pertama	DP2KBP3A	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
23	Bidan Penyelia	DP2KBP3A	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
24	Bidan Pelaksana Lanjutan	DP2KBP3A	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
25	Bidan Pelaksana	DP2KBP3A	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Bidan Pelaksana Pemula	DP2KBP3A	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
27	Penata Laksana Barang Penyelia	DP2KBP3A	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
28	Penata Laksana Barang Mahir	DP2KBP3A	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
29	Penata Laksana Barang Terampil	DP2KBP3A	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
30	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
31	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
32	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
33	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
34	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
35	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
36	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
38	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
39	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
40	Analisis Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
41	Analisis Ketahanan Keluarga	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
42	Analisis Sarana Program Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
43	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
44	Pengolah Data	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengadministrasi Umum	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
47	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
48	Pengawas Kependudukan	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Pengolah Data	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
50	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
51	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
52	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
53	Pengadministrasi Kependudukan	Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
54	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
55	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
56	Analisis Perlindungan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
57	Pengawas Perempuan dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
58	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Pengolah Data	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
60	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
61	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
62	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
63	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
64	Pengadministrasi Umum	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**22. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian	Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Pasar	Bidang Pasar	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
8	Pengawas Koperasi Muda	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
9	Penera Muda	Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Penyuluh Perindustrian dan Pergadangan Muda	Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Penyuluh Perindustrian dan Pergadangan Muda	Bidang Pasar	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
12	Pengawas Koperasi Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
13	Pengawas Koperasi Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
14	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	11	Rp 6.827.448	95%	10%		Rp 7.168.821
15	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
16	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
17	Pranata Komputer Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
18	Pranata Komputer Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
19	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
20	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
21	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
22	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
23	Penera Madya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	11	Rp 6.827.448	95%	10%	30%	Rp 9.217.055
24	Penera Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	Rp 5.166.121	95%	10%	30%	Rp 6.974.263

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Penera Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.152.215	95%	10%	30%	Rp 5.605.490
26	Penera Penyelia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.152.215	95%	10%	30%	Rp 5.605.490
27	Penera Pelaksana Lanjutan (Mahir)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	7	Rp 3.660.991	95%	10%	30%	Rp 4.942.339
28	Penera Pelaksana (Terampil)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	6	Rp 3.181.359	95%	10%	30%	Rp 4.294.835
29	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
30	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
31	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
32	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
33	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
34	Verifikator Anggaran	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
35	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
36	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
37	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
38	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
39	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
40	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
41	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
42	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
43	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
44	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
45	Analisis Koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
46	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
47	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
48	Fasilitator Sarana Pemasaran	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
49	Penyuluh Koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Pranata Koperasi	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
51	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
52	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
54	Penilai Pelayanan Kemetrolagian	Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
55	Penelaah Pengembangan Usaha	Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
56	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
57	Pengolah Data	Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
58	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
59	Analisis Data dan Informasi	Bidang Pasar	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
60	Analisis Pengembangan Pasar	Bidang Pasar	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
61	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	Bidang Pasar	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
62	Pengelola Pasar	Bidang Pasar	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
63	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bidang Pasar	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
64	Pengolah Data	Bidang Pasar	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
65	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Bidang Pasar	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
66	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Bidang Pasar	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**23. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
12	Kepala Seksi Pengendalian dan Penindakan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
13	Kepala Seksi Pengamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
14	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
15	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
16	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Bidang Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
17	Kepala Seksi Kedaruratan	Bidang Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Pranata Komputer Muda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
19	Pranata Komputer Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
20	Pranata Komputer Penyelia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
21	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
22	Pranata Komputer Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
23	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
24	Polisi Pamong Praja Muda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
25	Polisi Pamong Praja Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Polisi Pamong Praja Penyelia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
27	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
28	Polisi Pamong Praja Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
29	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
30	Pemadam Kebakaran Penyelia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
31	Pemadam Kebakaran Pelaksana Lanjutan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
32	Pemadam Kebakaran Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
33	Pemadam Kebakaran Pemula	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
34	Penata Laksana Barang Penyelia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
35	Penata Laksana Barang Mahir	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
36	Penata Laksana Barang Terampil	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
38	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
39	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
40	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
41	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
42	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
43	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
44	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
45	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
47	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
48	Pengadministrasi Kepegawain	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
49	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
50	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
51	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
52	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
54	Analisis Penyidikan	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
56	Pengadministrasi Umum	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
57	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
58	Pengolah Data Kebijakan Penindakan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
59	Komandan Petugas Keamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
60	Petugas Keamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
61	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
62	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
63	Komandan Petugas Keamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
64	Petugas Keamanan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
65	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
66	Pengelola Pengawasan	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
67	Pengadministrasi Umum	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
68	Analisis Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
69	Pranata Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
70	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
71	Penyuluh Bencana	Bidang Pemadam Kebakaran	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
72	Pengolah Data	Bidang Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
73	Teknisi Sarana dan Prasarana	Bidang Pemadam Kebakaran	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Penyuluh Bencana	Bidang Pemadam Kebakaran	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
75	Pranata Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
76	Pengadministrasi Umum	Bidang Pemadam Kebakaran	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**D. KLASIFIKASI IV**

**1. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	Rp 11.044.239	100%	45%		Rp 16.014.147
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
3	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
4	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
5	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
6	Rescuer Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	90%	5%		Rp 4.907.815
7	Rescuer Pelaksana Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.152.215	90%	5%		Rp 3.944.604
8	Rescuer Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%	5%		Rp 3.477.942
9	Rescuer Peelaksana Pemula	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%	5%		Rp 3.022.291
10	Pranata Komputer Muda	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
20	Analisis Tata Laksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Bendahara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
22	Verifikator Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Pengelola Teknologi Informasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
24	Pengadministrasi Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
25	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
26	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
27	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
30	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%	15%		Rp 2.785.814
31	Analisis Dampak Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pengelola Data Bantuan Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
34	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Penyusun Rencana Rehabilitasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**2. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Pelaihari	Kecamatan Pelaihari	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Pelaihari	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Pelaihari	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Pelaihari	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Pelaihari	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Pelaihari	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**3. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Bajuin	Kecamatan Bajuin	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Bajuin	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Bajuin	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Bajuin	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Bajuin	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Bajuin	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Bajuin	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Bajuin	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**4. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Takisung	Kecamatan Takisung	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Takisung	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Takisung	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Takisung	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Takisung	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Takisung	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Takisung	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Takisung	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Takisung	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Takisung	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Pengadministrasi Penerimaan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
25	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
26	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
27	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
28	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
29	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
31	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
32	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
33	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
34	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
35	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
36	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
37	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
38	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
39	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
40	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
41	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
42	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
43	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
44	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
45	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

5. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Panyipatan	Kecamatan Panyipatan	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Panyipatan	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Panyipatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Panyipatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Panyipatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Panyipatan	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Panyipatan	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Panyipatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

6. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Tambang Ulang	Kecamatan Tambang Ulang	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Tambang Ulang	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Tambang Ulang	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Tambang Ulang	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Tambang Ulang	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Tambang Ulang	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Tambang Ulang	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Tambang Ulang	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**7. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Bati-Bati	Kecamatan Bati-Bati	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Bati-Bati	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Bati-Bati	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Bati-Bati	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Bati-Bati	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Bati-Bati	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Bati-Bati	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Bati-Bati	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**8. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Kurau	Kecamatan Kurau	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Kurau	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Kurau	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Kurau	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Kurau	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Kurau	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Kurau	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Kurau	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Kurau	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Kurau	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**9. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Bumi Makmur	Kecamatan Bumi Makmur	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Bumi Makmur	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Bumi Makmur	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Bumi Makmur	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Bumi Makmur	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Bumi Makmur	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Bumi Makmur	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Bumi Makmur	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**10. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Batu Ampar	Kecamatan Batu Ampar	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Batu Ampar	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Batu Ampar	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Batu Ampar	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Batu Ampar	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Batu Ampar	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Batu Ampar	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Batu Ampar	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**11. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Jorong	Kecamatan Jorong	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Jorong	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Jorong	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Jorong	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Jorong	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Jorong	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Jorong	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Jorong	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Jorong	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Jorong	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
29	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
31	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
32	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
33	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
34	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
36	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
37	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
38	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
39	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
40	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
41	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
42	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
43	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
44	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**12. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Camat Kintap	Kecamatan Kintap	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
2	Sekretaris	Kecamatan Kintap	11	Rp 6.827.448	100%	40%		Rp 9.558.428
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat Kecamatan Kintap	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Kecamatan Kintap	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
8	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
9	Kepala Seksi Pelayanan	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
10	Pranata Komputer Muda	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Kecamatan Kintap	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Kecamatan Kintap	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Kecamatan Kintap	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Kecamatan Kintap	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Kecamatan Kintap	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Kecamatan Kintap	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Bendahara	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
22	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
23	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
24	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
25	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Data dan Informasi	Seksi Tata Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Tata Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223



No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Tata Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
31	Analisis Data dan Informasi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pranata Perlindungan Masyarakat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
34	Pengadministrasi Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi Umum	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
38	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
40	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
41	Analisis Pelayanan	Seksi Pelayanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
42	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
43	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**13. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN ANGSOU KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Lurah Angsau	Kelurahan Angsau	9	Rp 5.166.121	100%	30%		Rp 6.715.957
2	Sekretaris	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
6	Penata Laksana Barang Penyalia	Kelurahan Angsau	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Angsau	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Angsau	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

**14. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Lurah Pelaihari	Kelurahan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	100%	30%		Rp 6.715.957
2	Sekretaris	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
6	Penata Laksana Barang Penyalia	Kelurahan Pelaihari	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Pelaihari	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Pelaihari	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

15. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN SARANG HALANG KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Lurah Sarang Halang	Kelurahan Sarang Halang	9	Rp 5.166.121	100%	30%		Rp 6.715.957
2	Sekretaris	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
6	Penata Laksana Barang Penyalia	Kelurahan Sarang Halang	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Sarang Halang	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Sarang Halang	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

16. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN KARANG TARUNA KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Lurah Karang Taruna	Kelurahan Karang Taruna	9	Rp 5.166.121	100%	30%		Rp 6.715.957
2	Sekretaris	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
6	Penata Laksana Barang Penyelia	Kelurahan Karang Taruna	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Karang Taruna	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Karang Taruna	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

17. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN PABAHANAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Lurah Pabahanan	Kelurahan Pabahanan	9	Rp 5.166.121	100%	30%		Rp 6.715.957
2	Sekretaris	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
4	Kepala Seksi Pembangunan	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
5	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.152.215	100%	25%		Rp 5.190.268
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
6	Penata Laksana Barang Penyelia	Kelurahan Pabahanan	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
7	Penata Laksana Barang Mahir	Kelurahan Pabahanan	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
8	Penata Laksana Barang Terampil	Kelurahan Pabahanan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
10	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
11	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
13	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
14	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
15	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemerintahan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
16	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi Pemerintahan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
17	Pengadministrasi Pemerintahan	Seksi Pemerintahan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
18	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pembangunan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
19	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pembangunan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
20	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembangunan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
21	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kemasyarakatan	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kemasyarakatan	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
23	Pengadministrasi Umum	Seksi Kemasyarakatan	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA